

**KAPASITAS KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA SELAGANGGENG
KECAMATAN MREBET PURBALINGGA**

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh:

Dony Setiawan

1906016103

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2023

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada.

Yth. Dekan FISIP

UIN WALISONGO SEMARANG

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Dony Setiawan

Nim : 1906016103

Jur. : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Kapasitas Kepemimpinan Kepala Desa dalam Menjalankan Pembangunan Infrastruktur di Desa Selaganggeng Kecamatan Mrebet Purbalingga

Dengan ini saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan trimah kasih.

Pembimbing


Muhammad Mahsun, M.A

Tanggal: 27 Maret 2023

SKRIPSI
KAPASITAS KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA SELAGANGGENG
KECAMATAN MREBET PURBALINGGA

Disusun Oleh:

Dony Setiawan

1906016103

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 10 April 2023
Dan dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji


KEMENTERIAN KEMERDEKAAN
PERdagangan dan Industri
REPUBLIC OF INDONESIA
Dr. Ahwan Fanani, M.Ag
NIP. 197809302003121001

Penguji I


Dr. Ahwan Fanani, M.Ag
NIP. 197809302003121001

Sekretaris


Muhammad Mahsun, M.A
NIP. 198511182016011901

Penguji II


Tika Ifrida Takayasa, M.A
NIP. 198811152019032018

Pembimbing


Muhammad Mahsun, M.A
NIP. 198511182016011901

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar Pustaka.

Semarang, .. April 2023



Dony Setiawan
1906016103

The image shows a handwritten signature in black ink over a rectangular official stamp. The stamp contains the text 'SEMARANG' at the top, a Garuda emblem in the center, and 'METERAI TEMPEL' below it. There is also a date stamp '13 APR 2023' and a number '1906016103' at the bottom of the stamp.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT karena atas nikmat dan rahmatnya serta hidayah akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan oleh penulis. Kemudian shalawat serta salam penulis agungkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita semua mendapatkan karunia dan hidayahnya. Adapun maksud penulisan skripsi ini adalah sebagai gambaran mengenai apa yang penulis kerjakan dalam skripsi. Kemudian skripsi ini sebagai syarat dalam melaksanakan mata kuliah skripsi untuk menyelesaikan program studi strata satu (S-1) di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Oleh karenanya, pada kesempatan yang bahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. Misbah Zulfa Elizabeth, M. Hum selaku Dekan Fakultas FISIP
2. Drs. Nur Syamsudin, M.A selaku Kaprodi Ilmu Politik
3. Muhammad Mahsun, M.A selaku Dosen Pembimbing
4. Para dosen penguji skripsi yang telah menguji skripsi penulis dan memberikan masukan untuk perbaikan dalam skripsi penulis.
5. Seluruh DOSEN PROGRAM STUDI ILMU POLITIK UIN WALISONGO, terima kasih untuk semua pengajarannya dan bimbingannya. Semoga ilmu yang diterima oleh penulis kelak dapat bermanfaat untuk penulis.
6. Trima kasih kepada keluarga, khususnya ayah dan ibu yang telah memberikan yang terbaik untuk penulis yang tak terhitung nilainya. Dan kemudian terima kasih kepada kakek dan nenek yang telah mensupport cucunya untuk tetap berjuang.
7. Trima kasih untuk Esti Oktaviyani yang telah mensupport dan mendampingi penulis dari awal sampai akhir.
8. Trima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah memberikan dukungan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih untuk diri sendiri yang mampu berdiri dan berjuang sampai detik ini.

Penulis mendoakan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, mendapatkan ganti yang berkali-kali lipat serta selalu diberkahi Rahmat berlimpah dari Allah SWT. Amin. Semoga dengan terselesaikannya skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk penulis sendiri dan para pembaca nantinya. Dan kemudian penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena masih jauh dari kesempurnaan. Mengingat terbatasnya kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu

penulis memohon maaf serta selalu terbuka untuk semua dalam memberikan saran dan kritik dari pembaca.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Tanggung jawab utama dari seorang pemimpin adalah untuk menjabarkan kenyataan yang ada dan yang terakhir adalah mengucapkan terima kasih. Di selang waktu tersebut, pemimpin adalah pelayan”

PERSEMBAHAN

“Kupersembahkan skripsi ini untuk keluarga tercinta, ibu dan ayah yang selalu memberikan support yang tak ternilai dalam hitungan angka. Dan kemudian untuk kakek dan nenek yang telah memberikan yang terbaik untuk cucunya. Kemudian untuk orang tersayang yang selalu ada ketika dalam keadaan apapun. Untuk semua sahabat dan teman-teman yang senantiasa selalu mensupport saya dalam keadaan apapun”

Abstrak

Kapasitas Kepemimpinan Kepala Desa dalam menjalankan pembangunan infrastruktur di Desa Selaganggeng menjadi penentu berhasil tidaknya pembangunan infrastuktur. Adanya asas rekognisi dan subsidiaritas dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, seharusnya menjadikan desa menjadi lebih mandiri dan lebih bisa untuk mengembangkan potensi dan aset yang dimiliki desa. Tetapi hal tersebut harus dibarengi kapasitas kepemimpinan yang mumpuni dari seorang Kepala Desa sebagai aktor utama dalam desa, terutama kemampuan Kepala Desa dalam menerapkan prinsip transparansi, responsif, partisipatif, interaksi dan kerjasama. Karena jika hal tersebut berjalan kurang baik tentunya akan menghambat jalannya pembangunan infrastruktur Desa Selaganggeng. Kemudian rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kapasitas kepemimpinan Kepala Desa dalam menjalankan pembangunan infrastruktur di Desa Selaganggeng yang mencakup bagaimana kemampuan Kepala Desa dalam menerapkan prinsip-prinsip transparansi, responsif dan partisipatif dalam menjalankan agenda pembangunan infrastruktur Desa Selaganggeng serta bagaimana kemampuan interaksi dan kerjasama Kepala Desa Uut Triyas Yanuar dalam menjalankan pembangunan infrastruktur di Desa Selaganggeng.

Penelitian ini menggunakan teori governability yang dikembangkan oleh Jan Kooiman. Dimana dalam teori tersebut dijelaskan governability merupakan kapasitas atau kemampuan suatu pemerintahan untuk mengelola atau menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dimana keseluruhan proses tata kelola mulai dari input sampai output keseluruhan prosesnya merupakan governability. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yaitu dengan menggambarkan keadaan subjek dan objek, baik seorang, lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya serta didasarkan atas hasil observasi yang dilakukan serta memberikan argumentasi terhadap apa yang ditemukan dilapangan dan dihubungkan dengan konsep teori yang relevan. Kemudian hasil wawancara yang dikumpulkan dari beberapa narasumber untuk mendeskripsikan permasalahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kapasitas Kepemimpinan Kepala Desa dalam menjalankan pembangunan infrastruktur di Desa Selaganggeng masih sangat kurang. Ini disebabkan oleh Kemampuan Kepala Desa dalam menerapkan prinsip transparansi, responsif dan partisipatif masih sangat kurang, dikarenakan kurang efisiennya informasi yang diberikan pihak desa kepada masyarakat. Kemudian ketika masyarakat menyampaikan keluhan ataupun kritik tidak ditanggapi sama sekali dari pihak desa. Dalam pengambilan keputusan masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dan Kepala Desa memiliki kewenangan hak ya sangat besar dalam menentukan kebijakan desa. Serta kemampuan interaksi Kepala Desa Uut Triyas Yanuar masih sangat kurang, walaupun interaksi dengan perangkat desa sudah cukup baik. Tapi interaksi dengan masyarakat, BPD dan organisasi lainnya masih kurang baik, sehingga pada akhirnya menyebabkan tidak ada kerjasama antara desa dan masyarakat. tetapi di lain sisi, Kemampuan Kepala Desa dalam kerjasama dengan pihak luar sudah cukup baik, ini terlihat dari kerja sama antara desa dengan salah satu perguruan tinggi untuk renovasi dan penataan tribun di lapangan sepak bola desa, serta Kepala Desa juga berhasil meyakinkan salah satu pabrik kecantikan dengan produknya bulu mata untuk membuka cabang di Desa Selaganggeng. Dari penelitian ini, diharapkan menjadi sebuah gambaran pentingnya kapasitas kepemimpinan Kepala desa dalam menjalankan pembangunan infrastruktur desa, terutama bagi masyarakat Desa Selaganggeng supaya lebih kritis dan

aktif sebagai kontrol dari pemerintahan desa serta menjadi sebuah gambaran bagaimana nantinya dapat lebih jeli dalam memilih Kepala Desa dan untuk Kepala Desa serta Perangkat desa semoga menjadi sebuah gambaran untuk lebih baik kedepannya.

KATA KUNCI: Governance, governability, kepemimpinan, pembangunan infrastruktur, Desa Selanggang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN DAN MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II: KERANGKA TEORI	16
A. Definisi Konseptual	16
1. Kapasitas Kepemimpinan Kepala Desa.....	16
2. Kepemimpinan Kepala Desa.....	17
3. Pembangunan Infrastruktur.....	18
B. Teori Penelitian: <i>Governability</i>	19
1. <i>Governance</i>	20
2. <i>Governability</i>	21
BAB III: LANDSKAP DESA SELAGANGGENG DAN KONDISI INFRASTRUKTUR DESA SELAGANGGENG	25
A. Gambaran Umum Desa Selaganggeng	25
1. Sejarah Desa Selaganggeng	25
2. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Selaganggeng.....	26
3. Struktur Sosial Ekonomi Desa Selaganggeng.....	29
4. Struktur Sosial Politik Desa Selaganggeng.....	31

B. Gambaran Umum Kondisi Infrastruktur Desa Selaganggeng	33
BAB IV: KEMAMPUAN KEPALA DESA DALAM MENERAPKAN PRINSIP-PRINSIP TRANSPARANSI, RESPONSIF DAN PARTISIPATIF DALAM MENJALANKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA SELAGANGGENG	40
A. Prinsip Transparansi Kepala Desa dalam Menjalankan Pembangunan Infrastruktur di Desa Selaganggeng.....	40
B. Prinsip Responsif Kepala Desa dalam Menjalankan Pembangunan Infrastruktur di Desa Selaganggeng.....	46
C. Prinsip Partisipatif Kepala Desa dalam Menjalankan Pembangunan Infrastruktur di Desa Selaganggeng.....	50
BAB V: KEMAMPUAN INTERAKSI DAN KERJASAMA KEPALA DESA UUT TRIYAS YANUAR DALAM MENJALANKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA SELAGANGGENG.....	59
A. Kemampuan Interaksi Kepala Desa Uut Triyas Yanuar Dalam Menjalankan Pembangunan Infrastruktur Desa Selaganggeng.....	60
1. Interaksi dengan Birokrasi Desa atau Perangkat Desa	60
2. Interaksi dengan Badan Permusyawaratan Desa Selaganggeng	63
3. Interaksi dengan Masyarakat Desa Selaganggeng	64
B. Kemampuan Kerjasama Kepala Desa Uut Triyas Yanuar Dalam Menjalankan Pembangunan Infrastruktur di Desa Selaganggeng.....	66
BAB VI: PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Refleksi Teori.....	72
C. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	78
BIODATA	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Umur	27
Tabel 1.2 Tabel Pendidikan Dalam KK.....	28
Tabel 2.1 Data Penduduk Menurut Pekerjaan.....	34
Tabel 2.2 Data Penduduk Menurut Agama yang Dianut	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Fase dalam <i>Governability</i>	21
Gambar 1.2 Peta Desa Selaganggeng	26
Gambar 2.1 Pusat Kesehatan Desa	30
Gambar 2.2 Jalan Lorong Desa Selaganggeng	31
Gambar 3.1 Jalan Utama Desa Selaganggeng	36
Gambar 3.2 Jalan Ujung Desa Selaganggeng	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Draf Wawancara Kepala Desa Selaganggeng	78
Lampiran 1.2 Draf Wawancara Perangkat Desa Selaganggeng	79
Lampiran 2.1 Draf Wawancara Masyarakat Desa Selaganggeng	80
Lampiran 2.2 Foto Balai Desa Selaganggeng	81
Lampiran 3.1 Foto Bersama Sekretaris Desa Selaganggeng.....	82
Lampiran 3.2 Foto Struktur Desa Selaganggeng.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Desa adalah wilayah yang mempunyai peran penting untuk Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, dijelaskan definisi desa sebagai suatu kelompok masyarakat yang memiliki aturan serta mempunyai wilayah tertentu yang digunakan dalam kepentingan pemerintahan, keperluan masyarakat setempat, hak asli desa, dan hukum adat asli desa yang diakui serta sejalan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku (Siburian, 2021). Setelah diterapkannya Undang-Undang No.6 Tahun 2014, posisi desa memperoleh status istimewa melalui asas rekognisi dan subsidiaritas yang dimuat dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Dengan penerapan kedua prinsip tersebut, desa berwenang untuk mengatur pemerintahannya sendiri, terutama dalam mengelola aset dan potensi desa. Berdasarkan asas rekognisi pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahannya atas prakarsa masyarakat dan sejalan dengan budaya masyarakatnya serta tidak bertentangan dengan peraturan atau aturan yang berlaku. Asas tersebut mencakup pengelolaan aset, menyelesaikan masalah menurut hukum adat asli desa serta melestarikan budaya asli desa. Kemudian prinsip subsidiaritas memungkinkan desa mengatur sendiri dan mengelola pemerintahannya sendiri. Dimana kewenangan ini merupakan kewenangan desa dalam merumuskan kesepakatan desa tentang pembangunan wilayah. Dengan mendorong pembangunan pedesaan tentunya akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan mendorong berkembangnya kota yang lebih sehat (Femilia & Huda, 2020).

Permasalahan mendasar dalam berjalannya proses pemerintahan baik dalam tingkat pusat sampai desa, ialah bagaimana mendorong dan memunculkan aparatur pemerintah yang mampu menjalankan visi dan misi dalam mewujudkan masyarakat yang baik dan berkeadilan. Tentunya untuk mencapai cita-cita tersebut, pemerintah harus mencapai pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan mampu memberikan pelayanan publik yang baik (Soemantri, 2010:65). Untuk mencapai hal tersebut di atas, tentunya perlu ada kepala desa yang memiliki kapasitas untuk melaksanakan pembangunan desa. Sutoro Eko, pakar pemerintahan desa, mengidentifikasi lima jenis kemampuan pemimpin desa yang harus dikembangkan untuk memajukan otonomi desa. *Pertama*, kapasitas *regulatory*, yaitu kemampuan kepala desa untuk mengatur keadaan desa dan isinya (wilayah, tingkat kekayaan

dan kependudukan) melalui adat sesuai dengan kebutuhan desa. *Kedua*, kapasitas *ekstraksi*, yaitu kapasitas kepala desa untuk menghimpun, mengarahkan dan mengoptimalkan potensi dan aset desa untuk mendukung kebutuhan pemerintah desa dan masyarakat. *Ketiga*, kapasitas distributif, yaitu kemampuan kepala desa untuk mendistribusikan sumber daya desa secara merata dan seimbang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. *Keempat*, responsif, yaitu kemampuan peka dan tanggap terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat kepala desa untuk dijadikan pedoman dalam merencanakan kebijakan pembangunan. *Kelima*, kapasitas jejaring dan kerjasama, yaitu kemampuan mengembangkan dan memperluas kerjasama kepala desa dengan pihak luar untuk mendukung pembangunan desa (Eko, 2005).

Dari penjelasan Sutoro Eko di atas, menegaskan bahwa kualitas pembangunan desa ditentukan oleh kapasitas kepemimpinan kepala desa. Pemimpin tidak cukup hanya bersikap tegas serta sigap dalam menyelesaikan persoalan yang ada, tetapi seorang pemimpin juga harus bisa mengerti apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh bawahannya. Untuk menunjang hal tersebut seorang Kepala Desa harus mempunyai kapasitas kepemimpinan yang mumpuni dalam hal mengatur, mengelola, mengarahkan serta dapat mempengaruhi bawahannya untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakatnya (Marayasa, 2018). Pada hakikatnya jalannya pembangunan melibatkan tiga komponen penting, yaitu masyarakat, pemerintah dan pihak luar. Dalam menjalankan pembangunan pemerintah telah mendapati tantangan yang semakin berat, maka dari itu sangat diperlukan keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, sehingga jalannya pembangunan dapat berjalan dengan baik (Lamangida, et al. 2017).

Dalam ranah desa, kepemimpinan menjadi hal yang sangat penting, dikarenakan kepemimpinan seorang Kepala Desa akan menentukan bagaimana perkembangan pembangunan desanya. Dalam mewujudkan hal tersebut, seorang kepala desa harus memiliki kapasitas atau kemampuan yang mumpuni dalam menjalankan kepemimpinannya, sehingga dapat menunjang pembangunan infrastruktur yang lebih baik. Dengan kapasitas yang mumpuni, maka Kepala Desa dapat mendorong serta mengatur bawahannya untuk mengikuti cara kerjanya dan kepemimpinannya. Sehingga dengan demikian apa yang menjadi tujuan bersama dapat tercapai, termasuk pembangunan infrastruktur yang akan lebih berkembang dengan lebih baik dibandingkan dengan desa yang memiliki Kepala Desa dengan kapasitas kepemimpinan Kepala Desa yang kurang mumpuni dalam menjalankan tugasnya. Setiap Kepala Desa pasti memiliki ciri serta perbedaannya masing-masing, tentunya dalam hal ini tidak semua kepemimpinan Kepala Desa harus sama, dimana

hal tersebut tergantung pada bagaimana kepribadian serta cara seorang Kepala Desa menggunakan kekuasaannya. Dalam hal ini apakah seorang Kepala Desa lebih cenderung dekat dengan masyarakatnya atau malah sebaliknya dalam menjalankan pembangunan infrastruktur, tentunya hal tersebut akan memiliki pengaruh yang cukup besar untuk kemajuan pembangunan desa. Dalam memajukan pembangunan desa agar lebih berkembang pada dasarnya menjadi sebuah kesulitan terutama bagi Kepala Desa, ini dikarenakan seorang Kepala Desa dituntut untuk memiliki kapasitas/kemampuan kepemimpinan yang mumpuni dalam menjalankan pembangunan (Ningrum, 2015).

Fenomena terkait desa menjadi sangat menarik untuk dilakukan kajian terutama dalam hal kepemimpinan. Dalam konteks penelitian ini, penulis sangat tertarik untuk mengaitkan permasalahan antara kapasitas kepemimpinan Kepala Desa dengan pembangunan infrastruktur di salah satu desa, yaitu Desa Selaganggeng. Desa tersebut berada di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Dari hasil pengamatan langsung penulis, Desa Selaganggeng merupakan Desa yang terbilang monoton dalam proses pembangunan. Proses pembangunan di Desa Selaganggeng tidak mengalami kemajuan yang signifikan, terutama pada Kepala Desa periode saat ini yang dimulai dari 2019 sampai saat ini, terlihat dari pembangunan fasilitas infrastruktur desa (jalan, saluran air, sekolah dan lain sebagainya) tidak mengalami perkembangan yang merata, dimana pembangunannya hanya berfokus pada sekeliling Kantor Kepala Desa sedangkan yang tidak dekat dengan Kantor Kepala Desa tidak mengalami perkembangan, kegiatan masyarakat (Karang Taruna, PKK, gotong-royong dan lain-lain) hampir sama sekali tidak ada, dimana kegiatan pemuda serta kegiatan bulanan, seperti pengajian, sosialisasi maupun pemberdayaan masyarakat sangat jarang sekali dilakukan bahkan partisipasi masyarakat dalam gotong-royong sangat minim, serta masih banyak Perangkat Desa yang bekerja hanya sekedarnya, dimana ini terlihat Perangkat Desa hadir ke kantor seperlunya dan Perangkat Desa lepas tanggung jawab ketika ada program desa yang sedang berjalan. Tentunya hal ini akan mempengaruhi kualitas pembangunan desa dan pelayanan terhadap masyarakat akan mengalami penurunan, sehingga pada akhirnya menyebabkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa berkurang dan menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan menurun.

Berdasarkan permasalahan di atas, seharusnya dengan adanya asas rekognisi dan subsidiaritas, pembangunan di Desa Selaganggeng bisa lebih berkembang dan maju. Tentunya hal ini sangat dipengaruhi oleh Kepemimpinan Kepala Desa, terutama berkaitan dengan kapasitas kepemimpinan seorang Kepala Desa sebagai pemimpin di Desa Selaganggeng yang berwenang untuk menjalankan

pembangunan desa. Maka dalam penelitian ini, sangat menarik sekali bagi penulis untuk mengetahui bagaimana kapasitas kepemimpinan Kepala Desa Selaganggang dalam menjalankan pembangunan infrastruktur. Kemudian penulis akan memfokuskan kajian mengenai apakah buruknya perkembangan pembangunan infrastruktur di Desa Selaganggang dipengaruhi kemampuan Kepala Desa dalam menerapkan prinsip-prinsip transparansi, responsif dan partisipatif dalam menjalankan agenda pembangunan infrastruktur di Desa Selaganggang serta apakah buruknya pembangunan infrastruktur Desa Selaganggang dipengaruhi kemampuan interaksi dan kerjasama Kepala Desa dalam menjalankan pembangunan infrastruktur. Dimana dalam hal ini penulis telah mencoba mengetahui faktor-faktor mengapa pembangunan infrastruktur di Desa Selaganggang tidak mengalami perkembangan yang signifikan, dimana seharusnya dengan adanya asas rekognisi dan subsidiaritas yang menjadikan desa mandiri, tentunya dalam hal ini Desa Selaganggang dapat mengalami kemajuan dalam pembangunan infrastruktur, tetapi kenyataannya belum mengalami perkembangan pembangunan infrastruktur yang maju. Selanjutnya melakukan analisis terhadap kemampuan yang dimiliki Kepala Desa terutama kemampuannya dalam transparansi, responsif, partisipatif, interaksi dan kerjasama dalam menjalankan pembangunan khususnya infrastruktur di Desa Selaganggang serta menganalisa masalah ataupun kendala yang menyebabkan pembangunan infrastruktur di Desa Selaganggang kurang berkembang dengan baik, walaupun posisinya desa telah mendapatkan kewenangan serta diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagai pemerintahan yang mandiri.

Penelitian ini sangat penting dilakukan terutama untuk Pemerintah Desa dan Kepala Desa selaku yang berwenang menjalankan pembangunan desa. Dikarenakan penelitian ini akan sangat membantu bagi desa untuk mengetahui kapasitas pemimpinnya. Penelitian ini mencoba memberikan gambaran bahwa kapasitas seorang Kepala Desa dalam transparansi, responsif, partisipatif, interaksi dan kerjasama mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam jalannya pembangunan infrastruktur desa, dikarenakan Kepala Desa merupakan motor penggerak roda pembangunan infrastruktur desa. Tentunya apabila sosok seorang Kepala Desa tidak memiliki hal yang mumpuni untuk hal tersebut, maka pembangunan infrastruktur desa tidak akan berjalan dengan baik. Untuk itu hal tersebut menjadi sangat penting untuk dikaji oleh penulis.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Melalui latar belakang masalah di atas tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kapasitas kepemimpinan Kepala Desa dalam Menjalankan Pembangunan Infrastruktur di Desa Selaganggeng Kec. Mrebet Kab. Purbalingga yang meliputi:

1. Bagaimana kemampuan Kepala Desa dalam Menerapkan Prinsip-Prinsip Transparansi, Responsif dan partisipatif dalam menjalankan agenda pembangunan infrastruktur Desa Selaganggeng?
2. Bagaimana Kemampuan Interaksi dan Kerjasama Kepala Desa Uut Triyas Yanuar dalam Menjalankan Pembangunan Infrastruktur di Desa Selaganggeng?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kapasitas kepemimpinan Kepala Desa dalam menjalankan pembangunan infrastruktur di Desa Selaganggeng Kec. Mrebet Kab. Purbalingga yang meliputi:

1. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan kemampuan Kepala Desa dalam Menerapkan Prinsip-Prinsip Transparansi, Responsif dan partisipatif dalam menjalankan agenda pembangunan infrastruktur Desa Selaganggeng?
2. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Kemampuan Interaksi dan Kerjasama Kepala Desa Uut Triyas Yanuar dalam Menjalankan Pembangunan Infrastruktur di Desa Selaganggeng?

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua pihak yang berkepentingan. Adapun beberapa manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Untuk berkontribusi dalam ilmu pengetahuan
 - b) Sebagai referensi atau rujukan dalam penelitian berikutnya
2. Manfaat Praktis

- a) Dapat memberikan informasi maupun saran dan masukan kepada pihak yang berkepentingan atau yang membutuhkan, terutama untuk Lembaga maupun Instansi Pemerintahan.
- b) Diharapkan dapat membantu dalam menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi oleh pemerintahan (Desa Ganggeng) sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan birokrasi dalam menunjang pembangunan di Desa Selaganggeng.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang sudah dilakukan sebelum penulis yang dijadikan sebagai rujukan, dimana penelitian tersebut dilakukan dengan tema yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu kapasitas kepemimpinan Kepala Desa dalam menjalankan pembangunan infrastruktur di Desa Selaganggeng tetapi memiliki fokus kajian yang berbeda. Dimana penelitian terdahulu ini memiliki tema kapasitas kepemimpinan dan pembangunan infrastruktur.

1. Kapasitas Kepemimpinan

Penelitian mengenai kapasitas kepemimpinan dilakukan oleh Selo & Elwan & Rizal (2018), dengan judul “Strategi Pengembangan Kapasitas Kepemimpinan Dalam Mewujudkan Peningkatan Kinerja Pengelola Jabatan Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwasanya strategi pengembangan kapasitas kepemimpinan dapat memberikan dampak untuk memberikan kesempatan untuk ikut dalam pendidikan yang lebih baik dan terakreditasi untuk mendukung mutasi jabatan, memberikan dorongan untuk pegawai mengikuti diklat kepemimpinan, mendorong pegawai agar mengikuti diklat fungsional terutama untuk pemegang jabatan fungsional, mendorong pegawai untuk mengikuti diklat teknis, mendorong pegawai untuk mengikuti *short courses*, serta *inhouse* pelatihan dalam mengembangkan penguasaan dalam menjalankan tugas. Penelitian Mahmudah & Imelda (2021), dengan judul “Partisipasi masyarakat dan Kebijakan Kepemimpinan Dalam Percepatan Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta”. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya partisipasi masyarakat dalam menangani Covid-19 mengalami peningkatan, tetapi untuk meningkatkan hal tersebut dibutuhkan kapasitas

kepemimpinan yang dapat memberikan sebuah akses kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi. Setidaknya ada tiga kapasitas yang harus dimiliki oleh pemimpin, yaitu kapasitas membangun komunikasi dua arah, pembagian tugas serta dapat membangun kerelawanan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Sugiarto, dkk (2019), dengan judul “Investigasi Kapasitas Kepemimpinan Dalam Kelompok Peternak Sapi PO Kebumen di Pesisir Kabupaten Kebumen”. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya umur dari seorang ketua kelompok, pengalaman serta lamanya bergelut dengan dunia peternakan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kapasitas kepemimpinan ketua kelompok peternak dan ketua kelompok peternak Kebumen memiliki kapasitas kepemimpinan yang baik dikarenakan pengalaman serta telah lama terjun dalam dunia peternakan, sehingga memiliki kapasitas kepemimpinan yang cukup baik. Penelitian yang dilakukan Aqil & Munandar (2020), dengan judul “Kaderisasi PMII Cabang Kota Semarang Dalam Meningkatkan Kapasitas Kepemimpinan Anggota”. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya kaderisasi dalam organisasi PMII memiliki peran dalam peningkatan kapasitas kepemimpinan anggota melalui program kaderisasi normal, non formal serta informal. Dimana kaderisasi tersebut diawali dari MAPABA pada tingkat Rayon, kemudian PKD tingkat komisariat serta PKL pada tingkat Cabang PMII Kota Semarang. Penelitian yang dilakukan Shella (2020), dengan judul “Kapasitas Kepemimpinan Demokrasi Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pegajahan Serdang Berdagi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya kapasitas kepemimpinan demokratis Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat belum terlalu maksimal, hal tersebut dikarenakan Kepala Desa belum mampu dalam mengajak masyarakat desa untuk berpartisipasi untuk menjalankan dan ikut dalam program pemberdayaan yang dijalankan.

Dari penelitian terdahulu mengenai kapasitas kepemimpinan kebanyakan berbicara mengenai bagaimana strategi mengembangkan kapasitas kepemimpinan desa, kemampuan kepemimpinan dalam kebijakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa, peran kepemimpinan dalam suatu organisasi serta kemampuan kepemimpinan dalam pemberdayaan masyarakat desa. Ini menunjukkan bahwa penelitian terdahulu yang dirujuk oleh penulis lebih memfokuskan terhadap kepemimpinannya, atau lebih memfokuskan pada bagaimana seorang pemimpin maupun seorang aktor yang memiliki kuasa dalam suatu desa untuk bertindak dengan kepemimpinannya, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis saat ini memfokuskan terhadap bagaimana kemampuan seorang pemimpin dalam menjalankan suatu pembangunan terutama infrastruktur di desa, dimana dalam penelitian ini penulis akan mengkaji kemampuan pemimpin dalam transparansi,

responsif, partisipatif, interaksi dan kerjasama. Sehingga nantinya dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik, karena dengan seorang pemimpin yang kepemimpinannya baik, tetapi kemampuannya dalam hal tersebut kurang maka tentunya akan mempengaruhi bagaimana kualitas tata kelola pemerintahan desa terutama untuk menunjang pembangunan infrastruktur desa.

2. Pembangunan Infrastruktur

Penelitian yang dilakukan Fitrianti & Romadhan & Salahudin (2022), dengan judul “Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan: Kajian Pustaka Terstruktur”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tema *rural infrastructure development planning* menunjukkan bahwa terdapat 145 konsep dalam kajian perencanaan pembangunan desa. Lebih lanjut, kajian ini berkaitan dengan tema yang dominan seperti *rural area, land, rural development*. Penelitian yang dilakukan Matana & Lamandasa (2021), dengan judul “Kajian Pembangunan Infrastruktur Desa Sepe Kecamatan Lage”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya dana desa yang melalui APBDes dapat memberikan dampak baik bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Sape dan masyarakat juga bisa merasakan dampak positif dari APBDes. Kemudian selain merasakan dari dampak pembangunan, masyarakat juga merasakan dampak dari segi pemberdayaan yang dilakukan oleh desa melalui APBDes, yaitu dalam bentuk pemberdayaan pertanian, perkebunan maupun Kesehatan. Namun di lain sisi dana desa hanya menjadi stimulus dalam kemandirian ekonomi masyarakat desa, tapi belum terwujud secara tepat.

Penelitian yang dilakukan Mamonto & Sumampouw & Undap (2018), dengan judul “Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pemerintah Desa Ongkaw II telah menjalankan pembangunan infrastruktur. Dimana program yang berdasarkan aturan-aturan perundang-perundangan terlihat dalam proses target group atau masyarakat menjadi sasaran belum terlihat pembangunan yang baik terutama dalam sarana maupun prasarana infrastruktur di desa, sehingga kemudian menimbulkan dampak yang kurang baik dirasakan masyarakat, dikarenakan pemerintah Desa Ongkaw II belum secara maksimal menjalankan pembangunan infrastruktur. Penelitian yang dilakukan Jamaluddin & Sinaga (2023), dengan judul “Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangan Purba Kabupaten Deli Serdang

Tahun 2021". Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya secara kualitas pelayanan dapat dikatakan kurang maksimal, hal ini ditunjukkan dengan fasilitas yang ada terutama jalan, Keberhasilan Implementasi Program Pembangunan Jalan di Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 sebagaimana dilihat dari perspektif hasil: belum membawa manfaat kepada semua masyarakat Desa Ujung Rambe.

Dari penelitian terdahulu mengenai pembangunan infrastruktur kebanyakan berbicara mengenai perencanaan pembangunan infrastruktur desa, dan implementasi pembangunan infrastruktur desa. ini menunjukkan bahwa penelitian terdahulu yang dirujuk penulis, kebanyakan lebih memfokuskan pada bagaimana penggunaan anggaran, terutama dana desa untuk mengembangkan pembangunan infrastruktur desa, tetapi tidak ada yang mengaitkan pembangunan infrastruktur dengan kemampuan kepemimpinan Kepala Desa, padahal sebaik apapun program atau sebanyak apapun dana tanpa adanya kemampuan yang mumpuni dalam menunjang hal tersebut terutama Kepala Desa maka pembangunan infrastruktur tidak akan berjalan dengan baik. Disinilah kemudian penulis tertarik untuk mengaitkan permasalahan kapasitas kepemimpinan Kepala Desa dengan permasalahan pembangunan infrastruktur, karena tanpa adanya kemampuan kepemimpinan yang baik dari kepala desa untuk menunjang hal tersebut, tentunya agenda pembangunan infrastruktur desa tidak akan berjalan dengan baik, hal ini disebabkan karena dalam menjalankan agenda pembangunan akan dipengaruhi banyak hal seperti transparansi, responsif, partisipatif, interaksi dan kerjasama. Tentunya jika Kepala Desa kurang mumpuni dalam hal-hal tersebut akan menyebabkan terjadinya permasalahan tata kelola pemerintahan desa, karena kualitas pemerintahan desa sangat ditentukan dengan bagaimana kapasitas kepemimpinan Kepala Desanya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang terdapat di lapangan, dimana penulis turun langsung untuk melakukan penelitian di lapangan guna mendapatkan serta mengumpulkan data (Arikunto, 1995:58). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2008), metode penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala atau fenomena sentral. Untuk memahami gejala atau

fenomena sentral tersebut, penulis melakukan wawancara terhadap narasumber yang telah ditentukan dalam penelitian melalui pertanyaan yang lebih bersifat umum serta agak luas. Kemudian informasi tersebut dikumpulkan yang dimana berupa kata maupun teks. Kumpulan dari berbagai informasi tersebut selanjutnya dianalisis. Selanjutnya dari hasil informasi yang telah dianalisis, penulis kemudian melakukan penjabaran dengan mengaitkan pada penelitian-penelitian dari sarjana terdahulu. Dan kemudian hasil dari penelitian kualitatif digambarkan dalam bentuk sebuah laporan tertulis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, menurut Creswell (1998), pendekatan studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali fenomena tertentu atau kasus dalam waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi dan lain sebagainya) serta melakukan pengumpulan informasi dengan terperinci serta mendalam dengan menggunakan prosedur pengumpulan data dalam periode tertentu. Dimana dalam hal ini peneliti mencoba menggali informasi mendalam dari berbagai narasumber serta data pendukung mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pembangunan infrastruktur di Desa Selanggeng tidak berkembang dengan baik walaupun desa telah mendapatkan wewenang secara mandiri dalam asas rekognisi dan subsidiaritas serta mengumpulkan informasi yang mendalam mengenai permasalahan kapasitas kepemimpinan Kepala Desa Selanggeng dalam menjalankan pembangunan infrastruktur.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ialah berasal dari mana data tersebut dan dari mana data itu dikumpulkan (Arikunto, 129). Dalam penelitian ini, digunakan dua sumber data, yaitu:

a) Sumber data primer

Merupakan data yang didapatkan dan terkumpul langsung oleh penulis di lapangan dari narasumber atau informan (Suryabrata, 1987:93). Dimana data primer ini digunakan sebagai data utama yang diperoleh langsung oleh penulis untuk melakukan penelitian. Kemudian yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini ialah Kepala, Perangkat Desa, BPD, Karang Taruna, PKK, Kepala Dusun, Ketua RT serta masyarakat Desa Selanggeng.

b) Sumber data sekunder

Merupakan data yang didapatkan penulis sebagai pendukung data primer atau dapat dianggap sebagai data yang berbentuk dokumen (Suryabrata, 1987:94). Data sekunder ini digunakan sebagai data yang menjadi pendukung data primer serta sebagai pelengkap dan penguat, agar data yang didapatkan lebih akurat. Kemudian data sekunder dalam penelitian ini adalah literatur maupun dokumen seperti RPJMDes, APBDes, RKP Desa, Dana Desa dan lain sebagainya serta data yang didapatkan penulis di berbagai bacaan dari berbagai sumber yang memiliki kaitan dengan Kapasitas Kepemimpinan Kepala Desa dalam Menjalankan Pembangunan di Desa Selaganggeng Kec. Mrebet Purbalingga.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu:

a) Observasi

Pengamatan atau observasi adalah metode yang bisa dijalankan melalui cara melakukan pengamatan dengan teliti yang kemudian didukung pencatatan secara sistematis (Arikunto, 2013:45). Peneliti turun langsung di lokasi dan melakukan pengamatan terhadap objek yang menjadi fokus penelitian secara berulang. Observasi dilakukan oleh penulis untuk menganalisa suatu objek yang bertujuan untuk merasakan dan memahami dari suatu fenomena berdasarkan pengetahuan dan ide yang telah diketahui sebelumnya, untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, sehingga dapat melanjutkan ke proses investigasi. Sasaran observasi penulis dalam penelitian ini ialah keadaan desa, lingkungan, sarana prasarana, infrastruktur, hubungan masyarakat desa dengan pemerintah desa, hubungan Kepala Desa dengan masyarakatnya, komunikasi politik yang dilakukan Kepala Desa, keadaan tata kelola desa, kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat desa, apa yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat, hubungan Kepala Desa dengan bawahannya, karakteristik serta sikap perilaku kepala desa dan lain sebagainya. Observasi ini dilakukan pada objek tersebut, dikarenakan penulis menilai bahwa hal tersebut dapat mendukung data primer maupun sekunder bagi penulis dalam melakukan penelitian di Desa Selaganggeng.

b) Wawancara

Bungin, mengungkapkan bahwa wawancara merupakan kegiatan tanya jawab dalam sebuah penelitian secara lisan dan terdapat dua orang saling berinteraksi serta bertatap muka serta secara langsung mendengarkan informasi (Bungin, 2015). Ini menunjukkan bahwa wawancara merupakan suatu usaha dalam mengumpulkan data melalui sejumlah pertanyaan secara lisan. wawancara dilakukan oleh penulis untuk menggali serta mendapatkan informasi secara mendalam dari narasumber langsung mengenai hal-hal yang menyangkut dalam penelitian, guna mendapatkan data yang akurat mengenai permasalahan infrastruktur yang kurang berkembang dan kapasitas kepemimpinan yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam menjalankan pembangunan infrastruktur di Desa Selangggeng. Sasaran wawancara dalam penelitian ini ialah Kepala Desa, Aparatur Desa, Ketua RT/RW, Tokoh Masyarakat, Ketua Organisasi serta Masyarakat Desa Selangggeng.

c) Dokumentasi

Dokumentasi ialah metode yang dilakukan guna mendapatkan data yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian yang berupa data sekunder (Arikunto, 2013:104). Dokumentasi ini dilakukan penulis untuk mendapatkan data dengan cara melakukan kajian terhadap data yang berbentuk dokumen resmi, baik dalam bentuk visual maupun tulisan berhubungan dengan permasalahan penelitian yang berupa buku, pasal serta dokumen lainnya yang dianggap relevan serta gambar yang di dapatkan di lapangan. Data yang dihasilkan melalui dokumentasi ini seperti data dana desa, APBDes, RKP, RPJMDes, foto-foto infrastruktur desa dan lain sebagainya.

4. Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis ialah teknik analisis data interaktif. Miles dan Huberman (2007, dalam Sugiyono), menjelaskan bahwa teknik analisis data interaktif merupakan aktivitas dalam melakukan analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif serta dilakukan secara terus-menerus sampai selesai, sehingga menyebabkan data tersebut menjadi jenuh. Dimana

aktivitas tersebut meliputi reduksi data, visualisasi data serta verifikasi/penarikan kesimpulan. Untuk menunjang hal tersebut, maka penelitian dilakukan langsung di lapangan oleh penulis untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara berulang-ulang hingga sampai pada titik jenuh atau hasil yang diinginkan peneliti. Dimana hal tersebut harus melalui tiga tahapan, yaitu sebagai berikut:

a) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Setelah data di lapangan terkumpul dan dianalisis, maka selanjutnya dilakukan reduksi klasifikasi data, yang ditujukan untuk mendapatkan data yang bisa memberikan suatu gambaran yang lebih jelas. Sugiyono (2010), menerangkan bahwa mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilah hal pokok, memfokuskan pada permasalahan, menemukan tema serta pola. Reduksi tersebut ditujukan untuk mempermudah dalam memahami data yang telah terkumpul dari lapangan. Kemudian data tersebut dituliskan secara rinci dengan uraian singkat, faktor utama, serta fokus pada permasalahan yang sesuai dengan rumusan masalah.

b) *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah dilakukan reduksi pada data, maka dilanjutkan dengan menyajikan data. Miles dan Huberman (2012:249, dalam Sugiyono) menjelaskan bahwa penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif ialah teks yang berbentuk naratif. Penyajian data tersebut, dapat menunjukkan gambaran mengenai hasil dalam penelitian dengan terperinci serta menyeluruh berdasarkan pola hubungannya. Penyajian data ini merupakan hasil dari wawancara dengan Kepala Desa, Aparatur Desa, Ketua RT, Kadus, Ketua Organisasi Desa, Tokoh Masyarakat serta Masyarakat Desa Selaganggeng. Kemudian data observasi yang dihasilkan oleh penulis secara langsung di lapangan. Kemudian dokumentasi yang didalamnya berisikan data pendukung untuk data primer dan sekunder. Dimana keseluruhan data tersebut akan dipahami dengan terpisah. Selanjutnya akan disatukan serta diinterpretasikan sejalan dengan rumusan masalah.

c) *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah terakhir ialah penarikan kesimpulan serta memverifikasinya. Sugiyono (2010:245), menerangkan bahwa penemuan

dalam penelitian kualitatif dapat menjadi sebuah jawaban dalam permasalahan yang dirumuskan sejak awal, tetapi tidak akurat, dikarenakan seperti yang dinyatakan bahwasannya rumusan masalah serta permasalahan dalam penelitian kualitatif lebih bersifat sementara serta akan mengalami perkembangan sewaktu-waktu, jika kemudian ditemukan bukti lain yang lebih kuat, valid serta konsisten saat penulis kembali ke lapangan untuk mendukung pengumpulan data yang dimana kesimpulannya bersifat reliabel yang diperoleh dari hasil penelitian berupa pertanyaan singkat dan mudah dimengerti dalam menyimpulkan gambaran mengenai Kapasitas Kepemimpinan Kepala Desa dalam Menjalankan Pembangunan Infrastruktur di Desa Selaganggeng Kecamatan Mrebet Purbalingga.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan yang akan dikaji oleh penulis kenapa Kapasitas Kepemimpinan Kepala Desa dalam menjalankan pembangunan infrastruktur di Desa Selaganggeng. Kemudian pada bab ini memuat rumusan masalah dalam penelitian, manfaat dalam penelitian, tinjauan Pustaka yang menjadi sumber rujukan dalam penelitian ini yang mencakup dua tema, yaitu kapasitas kepemimpinan dan pembangunan infrastruktur, metode penelitian yang digunakan dalam penulis, yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan studi kasus, teknik analisis yang digunakan dalam penelitian, yaitu reduksi data, penyajian data dan *verification*, serta sistematika penulisan yang menjelaskan secara umum isi penelitian mulai dari bab pertama sampai bab terakhir.

BAB II: Bab ini menjelaskan kerangka teori yang digunakan oleh penulis dalam menunjang penelitian, dimana pada bab ini diawali penjelasan mengenai definisi konseptual dari kapasitas kepemimpinan Kepala Desa, kepemimpinan Kepala Desa dan pembangunan infrastruktur. Kemudian pada bab ini juga menjelaskan teori yang digunakan oleh penulis dalam menunjang penelitian, yaitu teori *governability*.

BAB III: Bab ini menjelaskan mengenai lanskap Desa Selaganggeng dan kondisi infrastruktur. Dimana bab ini menjelaskan gambaran umum Desa Selaganggeng yang meliputi sejarah Desa Selaganggeng, kondisi geografi dan demografi Desa Selaganggeng, struktur sosial ekonomi Desa Selaganggeng dan struktur sosial politik Desa Selaganggeng. Kemudian bab ini juga menjelaskan gambaran umum kondisi infrastruktur Desa Selaganggeng.

BAB IV: Bab ini menjelaskan jawaban mengenai kemampuan Kepala Desa dalam menerapkan prinsip-prinsip transparansi, responsif dan partisipatif dalam menjalankan agenda pembangunan infrastruktur di Desa Selaganggeng, dimana hal tersebut mencakup prinsip transparansi dalam menjalankan agenda pembangunan infrastruktur Desa Selaganggeng, prinsip responsif dalam menjalankan pembangunan infrastruktur Desa Selaganggeng dan prinsip partisipatif dalam menjalankan pembangunan infrastruktur Desa Selaganggeng

BAB V: Bab ini menjelaskan jawaban mengenai kemampuan Kepala Desa Uut Triyas Yanuar dalam menjalankan pembangunan infrastruktur di Desa Selaganggeng, dimana hal ini mencakup kemampuan interaksi Kepala Desa Uut Triyas Yanuar dengan birokrasi desa atau perangkat desa, interaksi dengan BPD dan interaksi dengan masyarakat Desa Selaganggeng dalam menjalankan pembangunan infrastruktur serta kemampuan kerjasama Kepala Desa Uut Triyas Yanuar dengan pihak ketiga atau luar dalam menjalankan pembangunan infrastruktur Desa Selaganggeng

BAB VI: Bab ini menjelaskan mengenai penutup dalam penelitian yang mencakup kesimpulan dari hasil yang jawaban dalam BAB IV dan BAB V, refleksi teori yang merupakan sebuah penjelasan mengenai kontribusi, kegunaan dan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam studi mengenai desa kedepannya, serta saran yang merupakan sebuah solusi dari sudut pandang penulis untuk bagaimana pembangunan infrastruktur Desa Selaganggeng bisa lebih baik.

BAB II

KERANGKA TEORI

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai definisi konseptual dan teori sekaligus kerangka konsep yang digunakan oleh penulis guna menunjang dalam menyelesaikan penelitian. Definisi konseptual yang digunakan oleh penulis disini ialah definisi yang relevan atau sejalan dengan apa yang menjadi pokok atau fokus dalam penelitian, yaitu definisi mengenai kapasitas kepemimpinan Kepala Desa, kepemimpinan Kepala Desa dan pembangunan infrastruktur. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai teori sekaligus kerangka konsep yang digunakan oleh penulis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian, yaitu teori *governability* dari Jan Kooiman. Berikut pembahasan secara lengkap definisi konseptual dan teori yang digunakan penulis dalam penelitian.

A. Definisi Konseptual

Definisi konseptual dapat dikatakan sebagai rangkaian konsep yang digunakan oleh penulis untuk menjelaskan suatu konsep yang mendukung teori dalam penulisan. Dalam hal ini penulis menggunakan tiga konsep, yaitu Kapasitas Kepemimpinan, kepemimpinan Kepala Desa dan Pembangunan infrastruktur yang dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Kapasitas Kepemimpinan Kepala Desa

Kapasitas kepemimpinan menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam suatu organisasi ataupun lembaga karena sangat menentukan bagaimana kemajuan serta kualitas dari seorang pemimpin bagaimana mengelolanya. Kemudian maju atau mundur suatu organisasi atau lembaga sangat dipengaruhi kapasitas kepemimpinan yang menjadi kemampuan dari seorang pemimpin dari mengelola organisasi yang dipimpinnya. Sutoro Eko, pakar pemerintahan desa, menjelaskan bahwasannya kapasitas kepemimpinan Kepala Desa merupakan kemampuan Kepala Desa dalam mengarahkan kebijakannya dalam berlangsungnya proses pemerintahan desa. Kemudian Sutoro Eko mengidentifikasi lima jenis kapasitas kepemimpinan Kepala Desa yang harus dimiliki atau dikembangkan untuk memajukan otonomi desa. *Pertama*, kapasitas *regulatory*, yaitu kemampuan kepala

desa untuk mengatur keadaan desa dan isinya (wilayah, tingkat kekayaan dan kependudukan) melalui adat sesuai dengan kebutuhan desa. *Kedua*, kapasitas *ekstraksi*, yaitu kapasitas kepala desa untuk menghimpun, mengarahkan dan mengoptimalkan potensi dan aset desa untuk mendukung kebutuhan pemerintah desa dan masyarakat. *Ketiga*, kapasitas distributif, yaitu kemampuan kepala desa untuk mendistribusikan sumber daya desa secara merata dan seimbang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. *Keempat*, responsif, yaitu kemampuan peka dan tanggap terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat kepala desa untuk dijadikan pedoman dalam merencanakan kebijakan pembangunan. *Kelima*, kapasitas jejaring dan kerjasama, yaitu kemampuan mengembangkan dan memperluas kerjasama kepala desa dengan pihak luar untuk mendukung pembangunan desa (Eko, 2005).

Di lain sisi Kooiman (2009), menjelaskan bahwasanya dalam proses pemerintahan dalam hal ini pemerintahan desa, agar terwujudnya *good governability* diperlukan tiga indikator, yaitu transparansi, respon terhadap opini publik serta keterlibatan seluruh elemen yang ada di desa dalam pengambilan keputusan, tentunya hal tersebut terwujud tidaknya sangat dipengaruhi oleh aktor utama dalam pemerintahan desa, yaitu Kepala Desa yang sejatinya harus memiliki kapasitas kepemimpinan dalam tiga hal tersebut. Seorang Kepala Desa dengan kapasitas kepemimpinan yang dimiliki serta dibantu oleh jajaran aparat desa tentunya harus mampu untuk menjalankan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa oleh negara, sehingga seluruh rangkaian proses pemerintahan dapat mencapai *good governability*, yaitu dimana seluruh rangkaian proses pemerintahan desa memiliki kapasitas yang baik dalam kualitas yang tidak hanya untuk yang diperintah, tetapi juga berlaku bagi mereka yang memerintahkan serta terjadinya interaksi atau hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakatnya berjalan dengan baik.

2. Kepemimpinan Kepala Desa

Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin, yang memiliki arti sebagai seseorang yang memiliki suatu kemampuan untuk menjalankan proses kegiatan organisasi guna menunjang agar organisasi tersebut berjalan dengan efektif dan efisien. Kepemimpinan menjadi suatu bentuk dominasi yang dilandaskan pada suatu kapabilitas atau kemampuan seseorang untuk mendorong serta mengajak orang lain melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini dikarenakan suatu kegiatan yang dilakukan banyak orang pastinya membutuhkan suatu

kepemimpinan untuk mengatur jalannya kegiatan tersebut (Solekhan, 2012:59). Dalam hal ini pemimpin dapat dikatakan sebagai suatu sumber inisiatif untuk melakukan tindakan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di jalannya suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilakukan seorang pemimpin dengan mendorong atau menggerakkan orang-orang atau seluruh anggota organisasi untuk berada dalam satu komando di bawahnya guna mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan dalam suatu organisasi memiliki peran yang sangat penting, dimana seorang pemimpin menjadi sosok yang sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi atau masyarakat karena posisinya dalam proses jalannya organisasi maupun dalam memecahkan suatu permasalahan. Demikian juga yang terjadi di desa seorang pemimpin dalam hal ini Kepala Desa memiliki peranan yang sangat penting, karena menjadi motor penggerak jalannya suatu pemerintah desa (Safitri, 2015).

Kepemimpinan Kepala Desa sangat dibutuhkan dalam berjalannya pemerintahan desa dengan baik, karena Kepala Desa berperan penting dalam menangani berbagai masalah serta memecahkan permasalahan yang terjadi dalam desa dan masyarakat. Kepemimpinan Kepala Desa pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana Kepala Desa bisa mengkoordinir seluruh kepentingan masyarakat desa dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukannya. Seorang Kepala Desa yang merupakan pemimpin tertinggi di Desa sudah seharusnya mempunyai kapasitas atau kemampuan yang mumpuni dalam memecahkan suatu permasalahan dan selalu meningkatkan melalui proses mengikutsertakan atau meningkatkan peran orang-orang yang dipimpinya (Safitri, 2015). Kemampuan Kepala Desa dalam membina serta mewujudkan kerja sama pada dasarnya menunjukkan bahwa Kepala Desa mampu melakukan dorongan serta meningkatkan keikutsertaan anggota maupun masyarakat untuk jalannya desa lebih efisien dan efektif. Sebagai seorang pemimpin Kepala Desa bukan hanya dituntut untuk mampu mengelola perangkat yang ada dalam desa, tetapi seorang Kepala Desa harus bisa menjadi pemimpin untuk seluruh masyarakat desa (Rivai & Mulyadi, 2009:108). Konsep kepemimpinan Kepala Desa menjadi sangat penting jika dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur desa, dikarenakan Kepala Desa memiliki peran penting dalam menentukan perkembangan pembangunan infrastruktur desa.

3. Pembangunan Infrastruktur

Secara etimologi, pembangunan berasal dari kata “bangun” yang diberi awalan “pem” dan diakhiri kata “an”, guna menunjukkan perihal pembangunan. Kata bangun memiliki setidaknya memiliki empat arti, yaitu *pertama*, dalam arti sadar

atau siuman, *kedua*, dalam arti berdiri atau bangkit, *ketiga*, dalam arti bentuk serta *keempat*, dalam arti kata kerja, yaitu sebagai membuat, mendirikan ataupun membina. Kemudian pembangunan meliputi segi bentuk, kehidupan dan perilaku (Mamonto & Sumampouw & Undap, 2018). Pembangunan bukan hanya sebatas fenomena, tetapi kemudian pembangunan harus melampaui sisi materi serta keuangan dari kehidupan manusia. Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang mencangkup perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga, pertumbuhan ekonomi serta masalah kesenjangan kemiskinan (Todaro, 2007:18). Dalam pembangunan terdapat dua tahap tujuan, yaitu *pertama*, pada dasarnya pembangunan memiliki tujuan untuk menghapus kemiskinan, apabila dampak tersebut mulai dirasakan, maka kemudian akan diciptakan suatu kesempatan kehidupan yang lebih baik dan terpenuhi kebutuhannya. Untuk mewujudkan hal tersebut banyak hal yang harus diwujudkan, diantaranya ialah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan itu sendiri (Gant & Suryono, 2006:31).

Pengertian infrastruktur memiliki banyak versi, menurut *American Public Works Associations* (dalam, Mamonto & Sumampouw & Undap, 2018), menjelaskan bahwa infrastruktur merupakan fasilitas fisik yang kemudian dikembangkan untuk fungsi pemerintahan untuk penyediaan air, listrik, limbah, transportasi maupun pelayanan similar guna memfasilitasi tujuan sosial dan ekonomi. Jadi dapat dikatakan infrastruktur merupakan sistem fisik yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam lingkup sosial maupun ekonomi. Sehingga dalam hal ini pembangunan infrastruktur dapat dikatakan sebagai suatu rangkaian perubahan yang dilakukan secara sadar dalam bentuk fisik, guna untuk menunjang kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dalam ranah desa pembangunan infrastruktur menjadi sangat penting dikarenakan dapat menunjang aktivitas keseharian masyarakat dan kebutuhan akan fasilitas publik masyarakat desa (Mamonto & Sumampouw & Undap, 2018).

B. Teori Penelitian: *Governability*

Ada dua konsep penting dalam pemerintahan, yaitu *governance* dan *governability*. Kedua konsep ini memberikan definisi terperinci tentang apa yang dimaksud dengan pemerintahan yang baik di mata publik (Kooiman, 2008). Untuk mengetahui lebih jauh mengenai *governability* yang digunakan sebagai teori dan kerangka konsep, maka penulis mengawalinya dari *governance* yang dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

1. *Governance*

Governance adalah istilah politik yang diterjemahkan menjadi kemudi. Ini bukan konsep baru dan mungkin memiliki arti yang berbeda tergantung pada konteks penggunaannya. Dalam konteks politik, definisi bakunya adalah otoritas dan sistem kekuasaan yang mengarahkan masyarakat melalui transparansi dan akuntabilitas (Kooiman, 2008). Dengan kata lain, itu adalah tindakan menjalankan otoritas dan kendali atas masyarakat dengan tujuan mencapai ambisi masyarakat/nasional. Dalam kebanyakan kasus, biasanya ditujukan untuk mencapai perkembangan masyarakat, sebuah proses yang biasanya dicapai melalui transparansi. Seperti disebutkan, istilah ini terutama dikaitkan dengan politik, meskipun dapat digunakan dalam dunia bisnis serta jalan keterlibatan manusia lainnya. Tokoh politik utama biasanya memiliki definisi tentang *governance*. Misalnya, Kooiman, et al (2008) mendefinisikannya sebagai pelaksanaan kekuasaan atau otoritas oleh pemimpin politik untuk kesejahteraan negara atau warganya. Chuenpagdee & Jentoft (2013) memiliki definisi yang berbeda tentang hal yang sama, dan menjelaskan bahwa ini adalah proses kompleks di mana beberapa sektor masyarakat menggunakan kekuasaan, memberlakukan dan menyebarluaskan kebijakan publik yang secara langsung mempengaruhi interaksi manusia dan institusi. serta pembangunan ekonomi dan sosial pemerintahan selalu baik untuk masyarakat, karena tanpa masyarakat biasanya berakhir menjadi kacau, tidak fokus dan bobrok secara sosial-ekonomi.

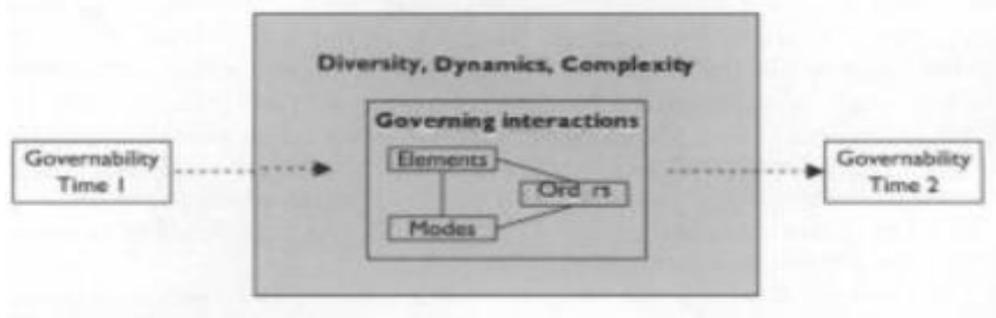
Konsep *governance* erat kaitannya dengan konsep pemerintahan. Mereka terdengar sinonim dalam disiplin akademis lainnya, tetapi dalam politik, mereka memiliki makna yang berbeda namun dekat. Pemerintah adalah istilah kolektif yang berarti lembaga pusat yang menjalankan kekuasaan atas rakyat. *Governance*, di sisi lain, adalah kesadaran bahwa pemerintah terlalu kecil untuk memerintah orang, sehingga membutuhkan pemerintah lain di dalamnya untuk berfungsi secara efektif. Tidak seperti aspek *governance* tradisional yang dilayani secara keseluruhan, *governance* saat ini mencakup tiga sektor masyarakat sipil, sektor swasta, dan sektor publik. *Governance* bekerja untuk memastikan bahwa sektor- sektor ini diarahkan untuk kebaikan bersama, yang merupakan pencapaian yang diinginkan. Jadi *governance* adalah desentralisasi kekuasaan untuk mengintensifkan fungsi pemerintahan. Tentunya dalam menunjang hal tersebut sangat berkaitan dengan *governability* (Kooiman, 2010).

2. *Governability*

Governability merupakan kapasitas atau kemampuan suatu pemerintahan untuk mengelola atau menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dimana dalam hal ini keseluruhan proses tata kelola atau *governance* mulai dari *input* sampai *output* keseluruhan prosesnya merupakan *governability*. Dan kemudian *governability* tidak bersifat statis karena dapat berubah-ubah tergantung faktor yang mempengaruhinya, pada faktor eksternal yang dapat dipengaruhi oleh pemerintah ialah seperti kerjasama dengan orang atau organisasi lain. Kemudian faktor internal, seperti perubahan pemerintahan dan instrumen atau potensi aksi sosial-politik (Kooiman, 2003). Kooiman dalam *governing as governance*, menjelaskan bahwa peran tata kelola dalam kaitanya dengan *governability* tidak bisa dilebih-lebihkan atau diremehkan. Karena mungkin bisa menjadi *governability* yang tinggi pada waktu tertentu, di lain sisi juga *governability* bisa berada pada fase sedang maupun rendah sekalipun pada waktu tertentu (Kooiman, 2003).

Gambar 1.1

Fase dalam *Governability*



Sumber: Buku *governing as governance*. Kooiman, 2003.

Governability terbagi dalam dua fase, yang pertama, dimana entitas sosial-politik mempunyai karakteristik khusus, dimana sebagian besar didasarkan pada warisan dan sebagian lagi pada keadaan eksternal dan internal yang sebenarnya. Pada fase pertama ini *governability* sangat dipengaruhi oleh

faktor baik dari dalam maupun luar. Dimana faktor dari dalam *governability* pada fase ini dipengaruhi oleh bagaimana perubahan dan potensi sosial politik dan kemudian faktor luar yang mempengaruhi *governability*, yaitu kerjasama dengan pihak luar, sehingga. Kemudian fase yang kedua, semua interaksi pengaturan pada tingkat yang disengaja serta struktural akan mempunyai efeknya pada tata kelola pemerintahan entitas tersebut (Kooiman, 2003:193).

Dalam sebuah *governability*, kualitas tidak hanya untuk yang diperintah, tetapi juga berlaku bagi mereka yang memerintahkan serta dibutuhkan juga interaksi atau hubungan diantara mereka. Ini menunjukkan bahwa *governing*, *governance* dan *governability* mempunyai kualitas mereka sendiri yang bersifat dinamis, kompleks serta beragam. Kurangnya wawasan mengenai hal tersebut mungkin menjadi salah satu penyebab banyak pemerintahan pada saat ini kurang efektif. Dari tiga sifat tersebut mempunyai konsekuensi khusus bagi *governance* dan *governability*. Keanekaragaman merupakan sumber kreasi serta inovasi, tetapi membawa bahaya disintegrasi, kompleksitas merupakan suatu kondisi dimana untuk menggabungkan Kembali ketergantungan masyarakat yang ada, tetapi harus dikurangi secara bertanggung jawab, dan kemudian dinamika masyarakat merupakan sebuah potensi perubahan masyarakat modern, tapi mereka memiliki konsekuensi yang dapat mengganggu. *Governability* sistem sosial dan politik sebagai input dan output dalam pemerintahan, sebagian besar memiliki ketergantungan pada cara keragaman, kompleksitas serta dinamika yang ditangani sebagai tugas pemerintahan. Tanggung jawab untuk tugas-tugas tersebut tidak diberikan kepada aktor atau otoritas publik, mereka adalah tanggung jawab untuk sistem sosial politik secara keseluruhan dengan area tugas publik, swasta serta campuran (Kooiman, 2003:209).

Dalam *governability* yang memberi perintah, yang diperintah, dan sifat interaksi antara pemberi perintah dan yang diperintah semuanya berkontribusi pada kemampuan memerintah masyarakat atau bagiannya. Dengan kata lain *governability* tidak dianggap sebagai sesuatu yang terutama disebabkan oleh kualitas entitas yang mengatur atau tata kelola seperti yang sering diperdebatkan dalam konsep lama tentang *governability*. Dalam perspektif tata kelola interaktif, *governability* dianggap sebagai kualitas sistem masyarakat secara keseluruhan. Untuk alasan itu, dapat didefinisikan sebagai kapasitas keseluruhan untuk tata kelola entitas atau sistem masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan tata kelola interaktif mengasumsikan bahwa kondisi kemampuan memerintah dari setiap sistem terus berubah dalam menanggapi tantangan eksternal dan internal. Tindakan tata kelola dapat memengaruhi

governability secara keseluruhan atau salah satu komponennya. Akan tetapi, banyak faktor eksternal juga mempengaruhi kemampuan memerintah, beberapa di antaranya tidak dapat, atau hanya tidak sepenuhnya demikian. ditangani baik oleh mereka yang mengatur atau mereka yang diatur pada skala yang diterapkan. Hal ini sering meningkatkan ketidakpastian sehubungan dengan kemampuan pengatur suatu sistem atau entitas masyarakat dalam manusianya serta bagian-bagian alaminya. Seseorang dapat menyatakan bahwa *governability* merupakan suatu kondisi yang berfluktuasi dalam skala yang berkelanjutan tanpa pernah mencapai ujungnya (Osborne, 2010:74)

Governability, di sisi lain, juga merupakan konsep dalam politik yang dapat merujuk pada kemampuan untuk memerintah dan diperintah. Sama seperti *governance* unsur *governability* adalah transparansi, tetapi yang terpenting, yang baik akan selalu transparan dan responsif terhadap opini publik. *Governability* yang responsif terhadap opini publik memungkinkan inklusi/partisipasi. Dalam hal ini *governability* kualitasnya ditentukan oleh aktor yang menjalankan, karena jika aktor yang menjalankan tidak memiliki kapasitas atau kemampuan yang baik dalam menjalankan unsur tersebut, maka dapat dipastikan *governability* tidak akan berjalan dengan baik (Chuenpagdee & Jentoft, 2013).

Governability yang baik sangat membutuhkan partisipasi berbagai sektor dalam tatanan masyarakat Inklusif atau lebih tepatnya partisipasi berarti keterlibatan setiap anggota dalam proses pengambilan keputusan. *Governability* menyediakan lingkungan yang luas bagi setiap anggota masyarakat untuk menjadi bagian dari pemerintah dan membuat keputusan yang berkaitan dengan kemajuan masyarakat. *Governability* juga menjalankan opini publik dengan mengelola bagian masyarakat yang paling kompleks dan memenuhi kebutuhan mereka secara normal. Bahkan dalam pemerintahan yang sangat tersentralisasi, *governability* akan selalu memastikan bahwa publik memiliki kepentingan tertinggi dalam kekuasaan dan menggunakannya secara tepat untuk mencapai kebutuhan mereka. *Governance* menjalankan transparansi dengan memastikan setiap anggota masyarakat memiliki informasi mengenai keputusan yang dibuat oleh pemerintah. *Governance* yang tidak stabil menyembunyikan informasi dari publik, suatu tindakan yang dapat disebut sebagai tidak demokratis, inkonstitusional dan dapat menyebabkan kekacauan publik (Kooiman, 2009).

Dalam menunjang hal tersebut sangat dibutuhkan adanya interaksi yang dilakukan oleh pelaku utama, yakni dalam konteks penelitian ini ialah Kepala Desa Selaganggeng. Hal ini dikarenakan transparansi, respon terhadap opini

publik dan keterlibatan sangat dipengaruhi bagaimana kemampuan pelaku utama dalam menerapkannya, sehingga akan ada keragaman pola interaksi yang mungkin dapat terjadi, dan karena sifat interaksi yang memungkinkan, tidak akan ada dinamika yang kuat berdasarkan ketegangan yang terjadi dalam interaksi. Pemerintah desa dalam hal ini yang dipegang oleh Kepala Desa akan menunjukkan berbagai profil keberagaman, dinamika dan kompleksitas, tergantung bagaimana interaksi yang diterapkan oleh Kepala Desa. Dari interaksi tersebut nantinya akan memicu terjadinya kerjasama dari berbagai pihak, baik dalam desa maupun luar desa untuk bagaimana infrastruktur dapat berkembang dengan baik (Kooiman, 2003).

BAB III

LANDSKAP DESA SELAGANGGENG DAN KONDISI INFRASTRUKTUR

A. Gambaran Umum Desa Selaganggeng

1. Sejarah Desa Selaganggeng

Selaganggeng berasal dari kata *sela* yang memiliki arti sebuah batu dan *ganggeng* yang memiliki arti lumut. Sehingga kemudian orang mengatakan bahwa Selaganggeng ialah batu berlumut yang pada zaman dahulu digunakan sebagai tempat bertapa. Sejarah mengenai desa Selaganggeng belum diketahui kebenarannya secara pasti, karena hanya didapatkan dari cerita yang turun-menurun. Desa Selaganggeng lahir pada zaman kerajaan-kerajaan Mataram yang kemudian menjadi awal mulai dikenalnya Desa Selaganggeng. Desa tersebut banyak dikenal orang pada saat era kepemimpinan Mbah Sandimeja, orang sekitar desa percaya bahwasanya beliau lah yang mengkeramatkan batu lumut tersebut yang dianggap seperti rumah-rumahan. Mbah Sandimeja merupakan orang yang sangat dihormati di wilayah Kecamatan Mrebet saat menjabat sebagai Kepala Desa Selaganggeng, selanjutnya kepemimpinannya dilanjutkan oleh putranya yang bernama Sumaryo. Dalam kepemimpinan Sumaryo Desa Selaganggeng tidak mengalami perkembangan yang bagus dibanding saat kepemimpinan Mbah Sandimeja. Kemudian pada saat itu terjadi keadaan darurat dimana Sumaryo mengalami sakit, sehingga harus digantikan yang tidak dengan cara pemilihan langsung, tetapi dipilih oleh kecamatan dan yang terpilih ialah Muhammad Triyono beliau menjabat sebatas mengurus pemerintahan agar dapat terkendali. Ia menjabat sebagai Kepala Desa selama satu tahun dan di perintahkan untuk membenahi pemerintahan yang kurang bagus, sekaligus menyiapkan untuk pemilihan kepala desa (Susanti, 2017).

Kemudian kepemimpinan Kepala Desa Selaganggeng dilanjutkan oleh Sudiyo yang terpilih dalam pilkades dan menjabat selama sepuluh tahun yang kemudian berhenti menjabat secara terhormat. Kemudian dilanjutkan Sugiastuti yang menjabat selama delapan tahun. Pada masa kepemimpinannya Desa Selaganggeng tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan yang kemudian kepemimpinan berganti dan dilanjutkan oleh Sujatmo. Pada masa kepemimpinan desa mengalami perkembangan yang cukup baik, seperti jalan yang sudah

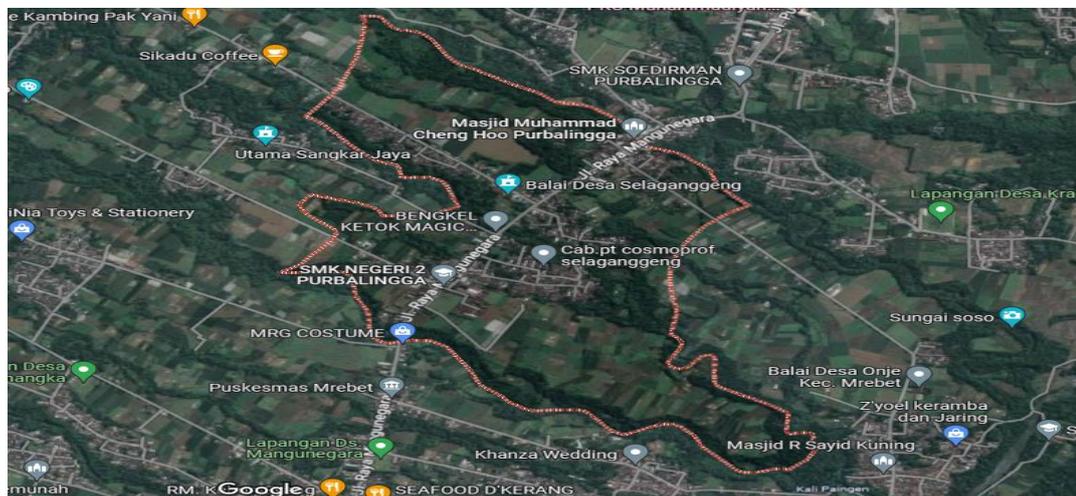
diperbaiki, kantor kepala desa yang diperbaiki serta fasilitas umum seperti masjid yang telah dibenahi. Selanjutnya kepemimpinan Desa Selaganggeng dilanjutkan oleh Uut Trias Yanuar sampai sekarang ini, dimana dalam kepemimpinannya Desa belum mengalami perkembangan yang cukup signifikan terlebih pada sektor infrastruktur (Susanti, 2017).

2. Kondisi Geografi dan Demografi Desa Selaganggeng

Selaganggeng merupakan nama desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Mrebet Purbalingga. Berdasarkan observasi langsung, secara geografis Desa Selaganggeng terletak di bagian utara dari ibu kota Kecamatan Mrebet yang menjadi bagian integral dari Kabupaten Purbalingga. Jarak Desa Selaganggeng dengan Pemerintah Kecamatan Mrebet 1,5 km dan dari Pemerintahan Kabupaten Purbalingga 10 km. desa Selaganggeng memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut, sebelah utara berbatasan dengan Desa Lambur, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mangunegara, sebelah barat berbatasan dengan Desa Mrebet, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Onje. Desa Selaganggeng memiliki wilayah yang cukup luas dibanding dengan desa lainnya, dimana Desa Selaganggeng memiliki luas wilayah 153,654 Ha yang terdiri dari lima RW dan tujuh belas RT.

Gambar 1.2

Peta Desa Selaganggeng



Sumber: <https://www.google.co.id/maps/place/Selaganggeng>

Secara demografis, keadaan penduduk Desa Selaganggeng berdasarkan sumber dari data desa pada tahun 2022, jumlah penduduk Desa Selaganggeng

sejumlah 4.881 jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 2.479 jiwa (50,79 persen) dan penduduk perempuan sebanyak 2.401 jiwa (49,19 persen). Jumlah penduduk tiap kelompok umur kebanyakan ialah usia remaja sampai dewasa, yaitu pada rentan umur 15-50 tahun. Kelompok pada rentan usia tersebut memiliki perbandingan cukup seimbang perbandingannya.

Tabel 1.1

Jumlah penduduk berdasarkan tingkat umur

No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	%	n	%	n	%
1	0 s/D 1 TAHUN	8	0,16%	8	0,16%	0	0,00%
2	2 s/d 4 Tahun	34	0,70%	12	0,25%	21	0,43%
3	5 s/d 9 Tahun	238	4,88%	126	2,58%	112	2,29%
4	10 s/d 14 Tahun	368	7,54%	204	4,18%	164	3,36%
5	15 s/d 19 Tahun	375	7,68%	196	4,02%	179	3,67%
6	20 s/d 24 Tahun	365	7,48%	177	3,63%	188	3,85%
7	25 s/d 29 Tahun	386	7,91%	208	4,26%	178	3,65%
8	30 s/d 34 Tahun	415	8,50%	208	4,26%	207	4,24%
9	35 s/d 39 Tahun	423	8,67%	212	4,34%	211	4,32%
10	40 s/d 44 Tahun	461	9,44%	248	5,08%	213	4,36%
11	45 s/d 49 Tahun	331	6,78%	173	3,54%	158	3,24%
12	50 s/d 54 Tahun	320	6,56%	167	3,42%	153	3,13%
13	55 s/d 59 Tahun	256	5,24%	120	2,46%	136	2,79%
14	60 s/d 64 Tahun	226	4,63%	109	2,23%	117	2,40%
15	65 s/d 69 Tahun	164	3,36%	86	1,76%	78	1,60%
16	70 s/d 74 Tahun	150	3,07%	67	1,37%	83	1,70%
17	Di atas 75 Tahun	361	7,40%	158	3,24%	203	4,16%
	JUMLAH	4881	100,00%	2479	50,79%	2401	49,19%
	BELUM MENGISI	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	TOTAL	4881	99,98%	2479	50,79%	2401	49,19%

Sumber: <https://sidesaselaganggeng.purbalinggakab.go.id/>

Berdasarkan data di atas jumlah penduduk Desa Selaganggeng antara penduduk laki-laki dan perempuan cukup seimbang, tidak terdapat selisih yang cukup jauh tentunya hal tersebut menjadi sebuah keuntungan bagi Desa Selaganggeng, karena dengan seimbangny jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, tentunya tidak akan memunculkan dominasi antara dalam masyarakat. Dan kemudian keseimbangan penduduk ini akan membuat partisipasi perempuan dalam pembangunan infrastruktur juga akan lebih baik. Penduduk Desa

Selaganggeng mayoritas berusia remaja sampai dewasa dengan rentan umur 15-50 tahun, tentunya hal juga seharusnya bisa menjadi sebuah keuntungan bagi desa, karena memiliki mayoritas penduduk dengan usia yang produktif, tentunya jika desa bisa memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki dengan baik dan efisien, maka akan mempermudah segala aspek untuk kemajuan desa terutama pembangunan infrastruktur.

Kemudian untuk tingkat pendidikan dari jumlah penduduk Desa Selaganggeng 4.881 jiwa, mayoritas penduduk desa merupakan tamatan SD/Sederajat, yaitu sebanyak 1.722 jiwa (35,28 persen), tidak atau belum sekolah sebanyak 935 jiwa (19,16 persen), SMP/Sederajat sebanyak 822 jiwa (16,84 persen), SMA/Sederajat 539 jiwa (11,04 persen), Diploma i/ii sebanyak 27 jiwa (0,55 persen), Diploma iii dan sarjana sebanyak 108 jiwa (2,21 persen). Ini menunjukkan bahwasanya tingkat pendidikan masyarakat Desa Selaganggeng masih kurang merata atau kurang baik, tentunya hal tersebut akan memiliki pengaruh terhadap kelangsungan pembangunan infrastruktur desa, dikarenakan kemampuan terhadap kritik atau merespon pemerintah desa akan semakin kecil, sehingga akan menyebabkan kontrol terhadap pemerintah desa menjadi lemah serta kesadaran untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur juga menjadi kurang.

Tabel 1.2

Tabel pendidikan dalam KK

No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	%	n	%	n	%
1	TIDAK / BELUM SEKOLAH	935	19,16%	473	9,69%	462	9,47%
2	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	723	14,81%	344	7,05%	379	7,76%
3	TAMAT SD / SEDERAJAT	1722	35,28%	880	18,03%	842	17,25%
4	SLTP/SEDERAJAT	822	16,84%	401	8,22%	421	8,63%
5	SLTA / SEDERAJAT	539	11,04%	310	6,35%	229	4,69%
6	DIPLOMA I / II	27	0,55%	10	0,20%	17	0,35%
7	AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA	108	2,21%	58	1,19%	50	1,02%
9	STRATA II	3	0,06%	3	0,06%	0	0,00%
	JUMLAH	4879	99,96%	2479	50,79%	2400	49,17%
	BELUM MENGISI	2	0,04%	0	0,00%	1	0,02%
	TOTAL	4881	99,98%	2479	50,79%	2401	49,19%

Sumber: <https://sidesaselaganggeng.purbalinggakab.go.id/>

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa kualitas pendidikan masyarakat Desa Selaganggeng masih kurang, hal ini terlihat dari jumlah penduduk Desa Selaganggeng mayoritas penduduknya merupakan tamatan SD atau bahkan tidak mengenyam dunia pendidikan. Hal tersebut nantinya akan menimbulkan sebuah permasalahan, dikarenakan masyarakat yang bisa dibilang sebagai kontrol terhadap pemerintahan desa tidak akan berjalan dengan baik. Kualitas pendidikan masyarakat desa yang kurang akan menyebabkan masyarakat kurang berfikir kritis, sehingga ketika pemerintah desa melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja maka tidak ada yang memberikan kritik atau saran, sehingga hal tersebut akan membuat pemerintah desa akan selalu berfikir bahwa apa yang mereka lakukan itu benar, walaupun yang mereka lakukan tidak mewakili yang dibutuhkan masyarakat. Tentunya hal tersebut akan memicu kurang maksimalnya tata kelola pemerintahan Desa Selaganggeng dan akan membuat program atau kebijakan desa tidak tepat sasaran.

3. Struktur Sosial Ekonomi Desa Selaganggeng

Berdasarkan observasi langsung, masyarakat Desa Selaganggeng tidak terlepas dari adanya aturan-aturan maupun adat yang ada dalam lingkungan masyarakat desa dalam pergaulan sehari-hari. Dimana kesatuan yang sangat dekat dengan masyarakat ialah kekerabatan, yaitu dimana keluarga inti yang dekat dan kaum kerabat yang lainnya. Tetapi saat ini hal tersebut sudah mulai berkurang hal ini dari organisasi desa tidak berjalan sama sekali, terutama kegiatan gotong-royong yang bisa dibilang hampir tidak pernah dilakukan lagi oleh masyarakat. Organisasi masyarakat Desa Selaganggeng kurang berkembang secara maksimal, terutama organisasi seperti Karang Taruna, Ikatan Remaja, PKK, maupun Majelis Ta'lim, hal ini dikarenakan salah satunya kesibukan masyarakat terhadap kepentingannya masing-masing. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat desa disibukkan dengan pekerjaan mereka masing-masing, dan kemudian masyarakat juga banyak yang tidak sempat mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi desa karena mereka kebanyakan berprofesi sebagai karyawan pabrik atau buruh pabrik, dimana mereka berangkat sekitar jam tujuh pagi dan pulang kadang sampai maghrib, sehingga membuat mereka tidak sempat melakukan aktivitas lainnya. Dan kemudian juga kebanyakan bekerja di luar daerah dan hanya bisa Kembali ke rumah setiap seminggu sekali ataupun satu bulan sekali.

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Selaganggeng bisa dibilang lumayan mencukupi. Melalui observasi langsung masyarakat Desa Selaganggeng mayoritas bekerja sebagai petani/pekebun 714 jiwa (14, 63 persen) dan juga karyawan swasta 854 jiwa (17, 50 persen). Tapi berdasarkan data desa, karyawan swasta menjadi pekerjaan mayoritas masyarakat Desa Selaganggeng, dimana dengan pekerjaan tersebut digunakan sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi dapat dikatakan perekonomian Desa Selaganggeng selain bertumpu pada pertanian juga sangat bergantung pada sektor swasta terutama untuk masyarakatnya.

Tabel 2.1

Data penduduk menurut pekerjaan

No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	%	n	%	n	%
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	1130	23,15%	585	11,99%	545	11,17%
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	301	6,17%	1	0,02%	300	6,15%
3	PELAJAR/MAHASISWA	698	14,30%	342	7,01%	356	7,29%
4	PENSIUNAN	28	0,57%	17	0,35%	11	0,23%
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	46	0,94%	25	0,51%	21	0,43%
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)	2	0,04%	2	0,04%	0	0,00%
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	6	0,12%	6	0,12%	0	0,00%
8	PERDAGANGAN	27	0,55%	9	0,18%	18	0,37%
9	PETANI/PEKEBUN	714	14,63%	341	6,99%	373	7,64%
10	PETERNAK	3	0,06%	2	0,04%	1	0,02%
12	INDUSTRI	10	0,20%	9	0,18%	1	0,02%
13	KONSTRUKSI	1	0,02%	0	0,00%	1	0,02%
14	TRANSPORTASI	3	0,06%	3	0,06%	0	0,00%
15	KARYAWAN SWASTA	854	17,50%	483	9,90%	371	7,60%
16	KARYAWAN BUMN	2	0,04%	2	0,04%	0	0,00%
17	KARYAWAN BUMD	2	0,04%	1	0,02%	1	0,02%
18	KARYAWAN HONORER	17	0,35%	10	0,20%	7	0,14%
19	BURUH HARIAN LEPAS	222	4,55%	142	2,91%	80	1,64%
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	10	0,20%	7	0,14%	3	0,06%
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	1	0,02%	0	0,00%	1	0,02%
24	TUKANG CUKUR	1	0,02%	1	0,02%	0	0,00%
26	TUKANG BATU	6	0,12%	6	0,12%	0	0,00%
27	TUKANG KAYU	4	0,08%	4	0,08%	0	0,00%
30	TUKANG JAHIT	3	0,06%	1	0,02%	2	0,04%
65	GURU	15	0,31%	6	0,12%	9	0,18%
70	AKUNTAN	2	0,04%	1	0,02%	1	0,02%
73	BIDAN	2	0,04%	0	0,00%	2	0,04%
74	PERAWAT	1	0,02%	0	0,00%	1	0,02%
81	SOPIR	34	0,70%	34	0,70%	0	0,00%
84	PEDAGANG	359	7,36%	162	3,32%	197	4,04%
85	PERANGKAT DESA	8	0,16%	7	0,14%	1	0,02%
88	WIRASWASTA	367	7,52%	270	5,53%	97	1,99%
	JUMLAH	4879	99,96%	2479	50,79%	2400	49,17%
	BELUM MENGISI	2	0,04%	0	0,00%	1	0,02%

Sumber: <https://sidesaselaganggeng.purbalinggakab.go.id/>

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa, keadaan ekonomi masyarakat Desa Selagangeng sudah lumayan, hal ini terlihat dari mayoritas masyarakat memiliki pekerjaan sebagai petani/pekebun dan karyawan swasta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, walaupun di lain sisi 29,32 persen dari jumlah penduduk tidak bekerja. Tentunya hal tersebut bisa menjadi permasalahan bagi desa, ini dikarenakan semakin banyak pengangguran atau masyarakat yang tidak bekerja, maka akan meningkatkan permasalahan kemiskinan bagi desa karena banyak masyarakatnya tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

4. Struktur Sosial Politik Desa Selagangeng

Desa Selagangeng merupakan desa yang memiliki penduduk yang mayoritas orang Jawa. Berdasarkan observasi langsung, struktur masyarakat Desa Selagangeng jika dilihat dari segi etnis mayoritas berasal dari etnis Jawa. Sedangkan dari segi agama, masyarakat Desa Selagangeng mayoritas beragama Islam yang bisa dibilang semuanya tergabung dalam Nahdlatul Ulama (NU). Dimana dari total penduduk desa 4.881 jiwa, yang beragama Islam 4.853 jiwa (99,43 persen), beragama Kristen 20 jiwa (0,41 persen) dan beragama Hindu 2 jiwa (0,04 persen). Kemudian dikarenakan mayoritas penduduk desa beragama Islam, maka dalam hal rumah ibadah yang dalam desa hanyalah masjid dan mushola, dimana terdapat tiga masjid dan empat mushola. Sedangkan penduduk yang beragama non-Islam ketika beribadah mereka ke Kota Purbalingga yang terdapat gereja dan pura. Walaupun penduduk desa mayoritas Islam, tetapi toleransi terhadap agama minoritas sangat baik, ini terlihat bahwa masyarakat Desa Selagangeng kehidupan agamanya sangat toleransi dan tidak terdapat konflik antar agama.

Tabel 2.2

Data penduduk menurut agama yang dianut

No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	%	n	%	n	%
1	ISLAM	4853	99,43%	2467	50,54%	2385	48,86%
2	KRISTEN	20	0,41%	9	0,18%	11	0,23%
4	HINDU	2	0,04%	1	0,02%	1	0,02%
7	Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya	2	0,04%	1	0,02%	1	0,02%
	JUMLAH	4877	99,92%	2478	50,77%	2398	49,13%
	BELUM MENGISI	4	0,08%	1	0,02%	3	0,06%
	TOTAL	4881	99,98%	2479	50,79%	2401	49,19%

Sumber: <https://sidesaselagangeng.purbalinggakab.go.id/>

Sikap toleransi dan menghargai budaya antar masyarakat desa membuat stabilitas sosial politik dalam desa tidak terjadi kegaduhan dalam persoalan-persoalan agama maupun etnis. Terjaganya sikap toleransi, saling menghargai budaya dan stabilitas politik desa, ini dikarenakan masyarakat Desa Selaganggeng yang mayoritas islam dan etnis jawa serta semuanya tergabung dalam Nahdlatul Ulama (NU) membuat hubungan masyarakat semakin erat, sehingga toleransi dan stabilitas sosial politik desa tetap tenang tanpa ada kegaduhan. Dan kemudian ketika terdapat kelompok-kelompok radikal seperti FPI, Jamaah Islamiyah dan lain sebagainya tidak terlalu terhiraukan dan tidak mendapat simpati dari masyarakat Desa Selaganggeng. Berdasarkan observasi langsung, masyarakat Desa Selaganggeng yang mayoritas islam dan etnis jawa, memiliki preferensi politik yang cenderung condong ke partai politik yang memiliki haluan atau basis pada partai nasionalis sekuler terutama pada partai PDI Perjuangan, sehingga tidak heran jika Desa Selaganggeng mayoritas penduduknya memiliki kecondongan untuk memilih PDI Perjuangan, baik pada Pilpres maupun Pilkada.

Kemudian berdasarkan observasi langsung, Desa Selaganggeng terakhir mengadakan pilkades pada tahun 2019. Dimana dalam pilkades tersebut terdapat dua calon Kepala Desa, Yaitu Dartono dan Uut Triyas Yanuar. Kedua calon tersebut memiliki latar belakang yang berbeda, dimana Dartono berlatar belakang sebagai tuan tanah di Desa Selaganggeng, dimana beliau merupakan orang memiliki ruko dan kontrakan yang cukup luas di Desa Selaganggeng. Kemudian Uut Triyas Yanuar memiliki latar belakang sebagai pengusaha mebel dan juga merupakan orang yang paling kaya dalam desa, beliau juga merupakan anak dari orang membangun masjid terbesar di Desa Selaganggeng yang sangat dihormati di desa. Dalam berjalanya proses pilkades dukungan penuh didapatkan oleh calon Kepala Desa Uut Triyas Yanuar, dikarenakan memiliki latar belakang yang cukup dikenal masyarakat desa dibanding lawannya ditambah mayoritas penduduk yang merupakan NU lebih condong ke beliau dikarenakan orang tuanya merupakan orang yang sangat disegani masyarakat desa terutama dalam hal agama. Sedangkan lawannya, Dartono tidak memiliki latar belakang yang cukup kuat, dikarenakan latar belakangnya sebagai orang biasa yang dikenal sebagai juragan ruko. Dalam pilkades tersebut pada akhirnya dimenangkan oleh Uut Triyas Yanuar sebagai Kepala Desa terpilih untuk masa jabatan pada tahun 2019-2024, hal ini sudah cukup terlihat bahwasanya beliau memiliki dasar kekuatan politik yang cukup besar dalam desa, sehingga menyebabkan lawannya kesulitan untuk mengalahkannya dalam pilkades.

B. Gambaran Umum Kondisi Infrastruktur Desa Selaganggeng

Berdasarkan observasi langsung, kondisi infrastruktur Desa Selaganggeng baik dalam pembangunan maupun pemeliharaan masih sangat kurang maksimal, ini dapat terlihat dari kondisi infrastruktur desa, seperti jalan yang berlubang serta kemudian juga saluran air atau drainase yang kurang optimal dalam menampung air, sehingga ketika hujan deras menyebabkan beberapa rumah mengalami banjir. Di lain sisi infrastruktur lain seperti Pusat Kesehatan Desa (PKD) dan juga fasilitas pendidikan terutama untuk anak-anak, seperti PAUD, TK dan lainnya masih sangat kurang, tentunya fasilitas tersebut harus dikembangkan, mengingat kedepan Desa Selaganggeng akan mengalami banyak penambahan penduduk, sehingga infrastruktur desa akan sangat dibutuhkan masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Dalam hal ini Pemerintah Desa Selaganggeng mengakui bahwa banyak kendala untuk melakukan pengembangan pembangunan infrastruktur ataupun perawatan dan renovasi, salah satunya disini dikarenakan adanya Pandemi Covid-19, sehingga membuat desa lebih berfokus untuk menangani masyarakat yang terdampak pandemi.

Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Sekretaris Desa Selaganggeng Maria Murtini, mengungkapkan bahwa,

“Kemampuan Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur tidak terlihat sama sekali mas, bisa dibilang selama Kepala Desa saat ini belum ada pembangunan infrastruktur desa, kendalanya karena ada pandemi, sehingga desa itu disibukkan untuk menangani permasalahan tersebut, sehingga menyebabkan pembangunan infrastruktur tidak jalan sama sekali” (Wawancara 5 Januari 2023).

Disini bisa dilihat bahwasannya pembangunan infrastruktur desa yang tidak mengalami kemajuan sama sekali, salah satunya disebabkan adanya pandemi Covid-19, sehingga kemudian membuat desa tidak bisa berfokus dalam mengembangkan infrastruktur desa, tetapi dalam hal ini seharusnya desa memiliki skala prioritas untuk pembangunan infrastruktur, dikarenakan setidaknya ketika ada pandemi selain pemerintah desa berfokus menangani masyarakat yang terdampak, di lain sisi infrastruktur desa tetap harus mendapatkan setidaknya perawatan agar tidak mengalami kerusakan yang semakin parah dan akan berdampak pada aktivitas keseharian masyarakat desa yang terganggu, tentunya hal tersebut membuat Desa Selaganggeng tidak mengalami perkembangan sama sekali dalam pembangunan infrastruktur.

Gambar 2.1

Pusat Kesehatan Desa



Sumber: Dokumentasi Januari Pribadi 2023

Pada gambar diatas merupakan gedung Pusat Kesehatan Desa Selanggang yang merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang dimiliki desa, dimana gedung ini digunakan sebagai kegiatan, seperti posyandu, sosialisasi Kesehatan, kegiatan PKK dan lain sebagainya. Dari hasil observasi langsung, gedung tersebut terletak di sebelah Balai Desa Selanggang. Kemudian aktivitas masyarakat di gedung ini bisa dibilang sangat jarang dan paling hanya digunakan untuk posyandu yang dilaksanakan satu bulan sekali atau jika ada sosialisasi kesehatan dan lain sebagainya. Gedung Pusat Kesehatan Desa (PKD) ini kondisinya masih cukup baik, tetapi sudah mulai mengalami kerusakan-kerusakan, seperti retak pada dinding, air yang mulai merembes dan sudah ditumbuhi lumut. Gedung tersebut dibangun pada masa pemerintahan Kepala Desa sebelumnya. Dan kemudian pada masa pemerintahan Kepala Desa saat ini belum ada renovasi untuk gedung tersebut ataupun pemeliharaan, sehingga menyebabkan gedung Pusat Kesehatan Desa Selanggang mengalami kerusakan. Sejalan dengan hal tersebut,

hasil wawancara dengan Ketua PKK Desa Selaganggeng Amalia, mengungkapkan bahwa,

“Untuk gedung Pusat Kesehatan Desa ini itu dibangun sama Kepala Desa yang dulu mas, sejauh ini sampai sekarang belum ada renovasi mas, gedung ini juga jarang digunakan mas paling untuk posyandu itu pun sebulan sekali mas sama kalau ada sosialisasi kesehatan mas paling” (Wawancara 3 Januari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwasannya, gedung Pusat Kesehatan Desa Selaganggeng dibangun oleh Kepala Desa terdahulu, sedangkan sampai saat ini belum ada sama sekali renovasi atau perbaikan, padahal kondisi bangunan sudah mengalami banyak kerusakan. Selain karena lama tidak mendapatkan renovasi Gedung Pusat Kesehatan Desa Selaganggeng juga jarang digunakan, sedangkan digunakan sebulan sekali untuk posyandu atau ketika ada sosialisasi kesehatan. Tentunya dalam hal ini semakin jarang digunakan maka ya semakin cepat gedung tersebut mengalami kerusakan, karena ketika jarang digunakan gedung tersebut tidak ada yang merawat, sedangkan ketika sering digunakan maka gedung tersebut akan sering dirawat fasilitas-fasilitas dalam gedung juga digunakan, sehingga ketika digunakan dan mengalami kerusakan maka akan diperbaiki.

Gambar 2.2

Jalan lorong Desa Selaganggeng



Sumber: Dokumentasi Pribadi Januari 2023

Pada gambar diatas merupakan kondisi jalan di salah satu gang atau lorong di RT 5/ RW 3 Desa Selaganggeng, gambar tersebut menunjukkan kondisi jalan yang sudah mengalami kerusakan yang cukup parah, dimana terlihat sudah terdapat keretakan yang cukup parah, hal ini dikarenakan tidak adanya renovasi atau pemeliharaan terhadap jalan tersebut. Berdasarkan hasil observasi langsung, pembangunan jalan di bagian lorong-lorong atau gang-gang di Desa Selaganggeng dilakukan pada masa pemerintahan Kepala Desa sebelumnya. Sedangkan pada masa pemerintahan Kepala Desa saat ini tidak ada pembangunan jalan ataupun perbaikan jalan di Desa Selaganggeng. Sejalan dengan hal tersebut, hasil wawancara dengan warga Desa Selaganggeng RT 5/ RW 3 Santoso, mengungkapkan bahwa,

“Jalan di desa ini itu terakhir ya pembangunanya pas Kepala Desa sebelumnya mas, kalau Kepala Desa yang sekarang belum ada renovasi untuk ya memperbaiki kondisi jalan yang sudah pada rusak mas, terus ya renovasi belum ada apalagi pembangunan mas belum ada sama sekali mas” (Wawancara 5 Januari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukan bahwa, selama masa pemerintahan Kepala Desa saat ini, belum ada sama sekali renovasi ataupun pembangunan jalan, padahal kondisi infrastruktur jalan sudah banyak mengalami kerusakan yang cukup parah sehingga tentunya sangat dibutuhkan renovasi dan pembangunan agar tidak semakin parah kerusakan yang terjadi di Desa Selaganggeng.

Gambar 3.1

Jalan utama Desa Selaganggeng



Sumber: Dokumentasi Pribadi Januari 2023

Pada gambar diatas merupakan jalan utama Desa Selaganggeng, jalan tersebut menjadi jalan yang akan dilewati ketika pertama kali memasuki desa, jalan tersebut juga menjadi jalan terlebar di desa, tetapi saat ini kondisi jalan sudah lumayan rusak parah, terlihat genangan air ada di tengah jalan dan ketika hujan jalan akan dipenuhi air, ini dikarenakan saluran air atau selokan rusak atau bahkan juga banyak yang sudah tidak ada karena tertimbun jalan, sehingga kemudian ketika hujan lebat bisa menyebabkan banjir. Berdasarkan observasi langsung jalan tersebut dibangun pada masa pemerintahan Kepala Desa sebelumnya, selepas dibangunnya jalan tersebut sampai saat ini belum ada renovasi ataupun perbaikan padahal kondisi jalan juga sudah lumayan parah dan sangat dibutuhkan perbaikan ataupun renovasi. Sejalan dengan hal tersebut, hasil wawancara dengan warga RT 2/ RW 1 Wagiono, mengungkapkan bahwa,

“Jalan depan itu ya sudah parah mas, kalau hujan itu banjir mas, soalnya kan banyak lubang terus genang airnya ditambah saluran airnya rusak mas, ya seharusnya sudah diperbaiki lah seenggaknya mas, ya kalau kayak yang susah warganya gotong royong sendiri buat perbaiki saluran air biar tidak banjir mas, seharusnya ya harus sudah diperbaiki mas, masak sudah empat tahun Pak Kades jabat ya tidak ada sama sekali pembangunan e mas” (Wawancara 5 Januari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa kondisi jalan utama Desa Selaganggeng sudah mengalami kerusakan yang cukup parah, dimana banyak terdapat lubang, sehingga ketika hujan menyebabkan banjir terutama untuk masyarakat sekitar jalan, karena selain banyak lubang juga saluran air mengalami kerusakan, sedangkan tidak ada renovasi atau pembangunan yang dilakukan oleh pihak desa, sehingga kemudian masyarakat melakukan gotong-royong sendiri untuk memperbaiki. Dan kemudian selama kurang lebih empat tahun Kepala Desa saat ini menjabat belum ada pembangunan ataupun renovasi infrastruktur terutama jalan.

Gambar 3.2

Jalan Ujung Desa Selaganggeng



Sumber: Dokumentasi Pribadi Januari 2023

Pada gambar diatas merupakan jalan yang posisinya paling jauh dengan Balai Desa Selaganggeng, dimana letaknya di bagian selatan desa berbatasan dengan desa Mangunegara, dimana kondisi jalan tersebut sudah cukup parah dan banyak sekali terdapat lubang serta genangan air yang tentunya hal tersebut dapat mengganggu pengguna jalan. Jalan tersebut sudah sangat membutuhkan perbaikan melihat kondisinya yang cukup parah kerusakannya. Berdasarkan hasil observasi langsung, jalan tersebut terakhir kali diperbaiki pada masa pemerintahan Kepala Desa sebelumnya dan itu sekali dilakukan perbaikan tersebut, kemudian sampai saat ini belum ada perbaikan atau renovasi lagi, sehingga menyebabkan kondisi jalan menjadi semakin parah, hal ini kemudian memunculkan banyak keluhan masyarakat desa, terutama warga yang tinggal di sekitaran jalan tersebut, karena selain menimbulkan genangan ketikan hujan juga menimbulkan banjir ketika hujan deras. Sejalan dengan hal tersebut, hasil wawancara dengan warga RT 3/ RW 5 Darso, mengungkapkan bahwa,

“Jalan disini RT 5 ya mas, ini kan posisinya kan paling ujung itu pembangunannya itu dari Kepala Desa sebelumnya mas dan kemudian cuma direnovasi sekali mas dan itu pun oleh Kepala Desa sebelumnya juga, sedangkan selama Kepala Desa saat ini belum perbaikan atau pembangunan sama sekali mas, padahal sudah hampir empat tahun mas tapi belum ada

sama sekali renovasi apalagi pembangunan mas” (Wawancara 5 Januari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwasannya jalan yang berada di RT 5 merupakan jalan yang berada di ujung desa, dan kemudian jalan tersebut dibangun dibangun oleh Kepala Desa pada masa jabatan sebelumnya dan hanya mengalami perbaikan sekali, sedangkan pada masa jabatan Kepala Desa saat ini yang kurang lebih sudah menjabat empat tahun belum ada sama sekali renovasi ataupun perbaikan, padahal seharusnya dengan kondisi jalan yang telah mengalami kerusakan tersebut sangat membutuhkan perbaikan, tetapi sampai saat ini belum ada perbaikan ataupun pembangunan sama sekali dari desa.

BAB IV

KEMAMPUAN KEPALA DESA DALAM MENERAPKAN PRINSIP-PRINSIP TRANSPARANSI, RESPONSIF DAN PARTISIPATIF DALAM MENJALANKAN AGENDA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA SELAGANGGENG

Dalam jalannya pemerintahan Desa Selaganggeng baik atau tidaknya perkembangan sangat dipengaruhi oleh aktor utama, yaitu Kepala Desa. Dalam hal ini, seorang Kepala Desa harus memiliki kemampuan atau kapasitas kepemimpinan yang mumpuni untuk menunjang segala program atau agenda pembangunan infrastruktur desa. dalam menunjang hal tersebut seorang Kepala Desa harus mampu menerapkan prinsip-prinsip transparansi, responsif dan partisipatif dalam menjalankan agenda pembangunan infrastruktur desa. Dalam teori *governability* dijelaskan bahwasannya *governability* yang baik sangat membutuhkan partisipasi berbagai sektor dalam tatanan masyarakat Inklusif atau lebih tepatnya partisipasi berarti keterlibatan setiap anggota dalam proses pengambilan keputusan. *governability* menyediakan lingkungan yang luas bagi setiap anggota masyarakat untuk menjadi bagian dari pemerintah dan membuat keputusan yang berkaitan dengan kemajuan masyarakat. *governability* juga menjalankan opini publik dengan mengelola bagian masyarakat yang paling kompleks dan memenuhi kebutuhan mereka secara normal. Bahkan dalam pemerintahan yang sangat tersentralisasi, *governability* akan selalu memastikan bahwa publik memiliki kepentingan tertinggi dalam kekuasaan dan menggunakannya secara tepat untuk mencapai kebutuhan mereka. *governance* menjalankan transparansi dengan memastikan setiap anggota masyarakat memiliki informasi mengenai keputusan yang dibuat oleh pemerintah. *governance* yang tidak stabil menyembunyikan informasi dari publik, suatu tindakan yang dapat disebut sebagai tidak demokratis, inkonstitusional dan dapat menyebabkan kekacauan publik (Kooiman, 2009).

A. Transparansi Kepala Desa dalam Menjalankan Agenda Pembangunan Infrastruktur Desa Selaganggeng

Dalam jalannya pemerintahan Desa Selaganggeng, tentunya prinsip transparansi menjadi hal yang sangat penting, dikarenakan transparansi ini akan membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. Tentunya dalam hal ini Kepala Desa Selaganggeng, yaitu Ut Triyas Yanuar harus mampu menerapkan

prinsip transparansi terutama dalam menjalankan pembangunan infrastruktur. Sehingga akan memicu tata kelola pemerintahan desa yang dapat menjalankan transparansi dengan memastikan setiap anggota masyarakat memiliki informasi mengenai keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Tata kelola pemerintahan desa yang tidak stabil dan menyembunyikan informasi dari publik, tentunya ini merupakan suatu tindakan yang dapat disebut sebagai tidak demokratis, inkonstitusional dan dapat menyebabkan kekacauan publik dan masyarakat akan mengalami penurunan kepercayaan terhadap pemerintahan desa (Kooiman, 2009).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung yang dilakukan di lapangan menunjukkan bahwasannya kemampuan Kepala Desa Uut Triyas Yanuar dalam menerapkan prinsip transparansi dalam menjalankan pembangunan infrastruktur masih kurang. Hal ini terlihat bahwa masyarakat banyak yang tidak mengetahui mengenai dana desa, program desa, alokasi untuk pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Tentunya ini menunjukkan penerapan prinsip transparansi oleh Kepala Desa masih kurang. Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Selaganggeng Uut Triyas Yanuar, mengungkapkan bahwa,

“Kami pihak desa selalu memberikan informasi yang ada di desa sama masyarakat mas, kayak misalnya kemarin pas pandemi mas, kita pihak desa akan memberitahukan siapa saja yang mendapatkan mas melalui papan pengumuman desa, kemudian untuk dana desa yang paling bikin baliho atau spanduk terus dipasang depan balai desa mas dan itu juga paling cuma awal tahun mas. Untuk pembangunan infrastruktur belum ada mas, ya bagaimana karena terhalang pandemi mas jadinya desa fokus ke penanganan pandemi mas jadinya pembangunan tidak ada progres mas” (Wawancara 3 Januari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwasannya pihak desa selalu memberikan informasi yang ada di desa kepada masyarakat, seperti pada saat pandemi pemerintah desa memberikan informasi siapa saja mendapatkan bantuan terdampak pandemi di papan informasi desa. dan kemudian untuk dana desa, pihak desa hanya memasang baliho atau spanduk di depan balai desa, tentunya hal tersebut membuat banyak masyarakat desa kurang mengerti informasi mengenai dana desa dikarenakan masyarakat jarang ke balai desa, kecuali ketika ada kepentingan tertentu saja dan kemungkinan jika baliho hanya dipasang awal tahun, sehingga ada kemungkinan paling dua atau satu bulan, baliho tersebut dicopot. Padahal seharusnya dana desa adalah informasi yang harus diberitahukan masyarakat desa, sehingga dapat mengetahui progress tentang rinciannya dan masyarakat juga dapat menjadi kontrol atas dana desa dan penggunaan dana desa

bisa tepat sasaran. Dan kemudian untuk pembangunan infrastruktur juga belum ada, dikarenakan adanya pandemi yang menyebabkan pemerintah desa fokus untuk menangani pandemi, sehingga menyebabkan pembangunan infrastruktur tidak dapat berjalan.

Sejalan dengan hal tersebut, hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Selaganggang Maria Murtini, mengungkapkan bahwa,

“Kalau kemampuan transparansi Pak Kades ya sudah baiklah mas, kayak kemarin pas pandemi juga nama-nama yang mendapatkan bantuan dipasang mas di papan informasi desa, jadi masyarakat itu melihat sendiri jadi tidak ada simpang siur mas. Kalok untuk pembangunan tidak ada sama sekali mas karena desa fokus ke penanganan pandemi mas. Untuk dana desa biasanya kami pasang baliho depan balai desa mas setiap keluar awal tahun mas jadi bisa dilihat oleh masyarakat mas” (Wawancara 5 Januari 2023)

Kemudian hasil wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan Desa Selaganggang Faiz Hidayatulloh, mengungkapkan bahwa,

“Untuk transparansi sudah baik mas, ya informasi-informasi seperti dana desa juga dipasang di depan balai desa pake baliho, terus kayak ada informasi kayak bantuan-bantuan juga dipasang di papan informasi mas. Kalo untuk pembangunan belum ada mas kan ini gara-gara ada pandemi mas jadi desa fokus ke penanganan pandemi mas” (Wawancara 4 Januari 2023)

Berdasarkan hasil dua wawancara tersebut, menunjukkan bahwasannya kemampuan Kepala Desa dalam transparansi sudah cukup baik, ini terlihat ketika pandemi pihak desa memasang nama-nama warga yang mendapat bantuan terdampak pandemi, sehingga tidak ada informasi yang simpang siur. Kemudian transparansi untuk pembangunan infrastruktur tidak ada, dikarenakan tidak ada progres pembangunan, dikarenakan desa fokus untuk menangani pandemi. Selanjutnya untuk dana desa pihak desa pasang baliho di depan balai desa sehingga dapat dilihat masyarakat, padahal bisa dikatakan itu tidak efisien karena tidak semua bisa melihat baliho tersebut, seharusnya baliho tersebut bisa dipasang di tempat-tempat yang strategis, seperti di jalan utama masuk desa sehingga dapat dilihat masyarakat. Hal tersebut merupakan hasil wawancara dari perangkat desa, tetapi di lain sisi hal tersebut tidak sejalan dengan apa yang disampaikan dalam hasil wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tris Sugiarto, mengungkapkan bahwa,

“Transparansi yang dilakukan Pak Kades ya masih kurang mas menurut saya, masak baliho anggaran desa yo mbok di bikin yang banyak jadi bisa

dipasang banyak tempat mas jadinya kan masyarakat tau itu tentang dana desa mas, terus ini mas kan selama pandemi itu kan pembangunan tidak ada progres kan tidak mungkin duit desa habis cuma buat bantuan terdampak pandemi mas, saya sudah bosan buat ngasih tau mas buat bikin pengumuman biar tau duitnya itu sisa berapa buat apa gitu mas, tapi tidak pernah ditanggapi mas, orangnya sibuk bisnisnya sendiri mas dari pada tanggung jawabnya sebagai Kepala Desa ditambah rumornya mau nyalon DPR mas, makanya makin runyam masalah duit mas” (Wawancara 7 Januari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwasanya transparansi yang dilakukan oleh Kepala Desa masih kurang, dikarenakan pemberian informasi seperti dana desa kurang efisien karena hanya berfokus pada balai desa dan kemudian tidak adanya kejelasan atau transparansi mengenai dana desa yang hanya digunakan untuk bantuan terdampak pandemi yang tidak mungkin menghabiskan dana desa. kemudian juga sebagai Kepala Desa, seharusnya bisa lebih bertanggung jawab atas amanahnya sebagai pemimpin desa, sehingga dapat mengedepankan tanggung jawabnya sebagai Kepala Desa dari pada kepentingan pribadi. Tentunya dalam hal ini mengenai desa, seharusnya bisa lebih transparansi mengingat sudah terdapat rumor mengenai pencalonan Kepala Desa sebagai DPR, tentunya jika tidak adanya kejelasan mengenai dana desa dapat memunculkan asumsi-asumsi yang berdampak buruk bagi Kepala Desa sendiri. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintahan Desa Selaganggang masih kurang dalam menerapkan prinsip transparansi dan tentunya menunjukkan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan masih kurang baik. Padahal kualitas tata kelola pemerintahan desa sangat ditentukan oleh kapasitas transparansi dari aktor utamanya, yaitu Kepala Desa. Sejalan dengan hal tersebut dalam teori *governability*, dijelaskan bahwa tata kelola pemerintahan, dalam hal ini pemerintahan Desa Selaganggang harus menjalankan transparansi dengan memastikan setiap anggota masyarakat memiliki informasi mengenai keputusan yang dibuat oleh pemerintah desa (Kooiman, 2009).

Sejalan dengan permasalahan di atas, hasil wawancara dengan ketua Karang Taruna, Ikbar Wardede, mengungkapkan bahwa,

“Masih kurang lah mas, saya aja kurang paham masalah duit desa mas, terus gak kayak biasanya kayak di desa-desa lain kan ada baliho apa spanduk jadi kita tau itu mas ditambah lag ikan tidak ada pembangunan sama sekali selama Kepala Desa ini mas” (Wawancara 7 Januari 2023)

Selanjutnya sejalan dengan hal tersebut, hasil wawancara Ketua Remaja Drajat, mengungkapkan bahwa,

“Kalo masalah transparansi masalah duit itu kurang paham mas, ya gimana ya tau sendiri kalo masalah duit itu gimana mas susah, pembangunan juga tidak ada mas, masalah anggaran yang saya tau cuma buat bantuan buat pandemi kemarin mas, itu kalau tidak salah satu orang dapat tiga ratus lima puluh ribu mas” (Wawancara 7 Januari 2023)

Berdasarkan hasil dari dua wawancara tersebut, menunjukkan bahwasannya prinsip transparansi yang dilakukan Kepala Desa masih kurang, ini dikarenakan dana desa tidak diketahui banyak orang, hanya diketahui oleh perangkat desa saja ditambah untuk pemberitahuan mengenai data anggaran desa juga tidak efektif karena hanya berpusat di balai desa, dan kemudian juga data mengenai pembangunan desa juga tidak ada, dikarenakan memang selama masa pemerintahan Kepala Desa saat ini belum ada pembangunan infrastruktur desa. Tentunya permasalahan tersebut, menunjukkan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan desa masih sangat kurang, hal ini dikarenakan aktor utama yang menjalankan, yaitu Kepala Desa Kapasitas Kepemimpinannya dalam prinsip transparansi masih sangat kurang, padahal dalam *governability*, tata kelola yang baik harus memastikan transparansi berjalan dengan baik, karena jika transparansi tidak berjalan dengan baik, maka dapat dikatakan Pemerintahan Desa selaganggeng kurang demokratis, sehingga dapat menyebabkan kekacauan publik (Kooiman, 2009).

Dan kemudian hal tersebut di atas, diperkuat dari hasil wawancara dengan Santoso, warga RT 1/ RW 3 Desa Selaganggeng, mengungkapkan bahwa,

“Saya kurang paham mas apalagi masalah duit mas, setahu saya kalau dana desa itu kan buat bangun jalan gitu mas, tapi ya sampai saat ini tidak ada pembangunan mas padahal jalan sudah pada rusak mas” (Wawancara 5 Januari 2023)

Kemudian sejalan dengan hal tersebut hasil wawancara dengan Saniem, warga RT 2/ RW 5 Desa Selaganggeng, mengungkapkan bahwa,

“Masalah duit ini sama sekali tidak tau mas, taunya itu kemarin pas bantuan-bantuan kemarin pas pandemi mas, itu satu orang dapat tiga ratus lima puluh ribu mas. Kalo pembangunan tidak ada setau saya mas, jalan-jalan yang ada sekarang itu yang bangun Pak Sujatmo mas Kades yang dulu” (Wawancara 5 Januari 2023)

Dan kemudian hal tersebut juga sejalan dari hasil wawancara dengan Bejo, warga RT 3/ RW 1 Desa Selaganggeng mengungkapkan bahwa,

“Masalah dana desa saya tidak tau mas, saya bukan pegawai desa jadi nggak tau mas, tapi kalo pembangunan itu tidak ada mas setau saya, jalan-jalan, selokan sama yang lainnya ini itu yang bangun Pak Jatmo mas, Kepala Desa yang dulu mas” (Wawancara 5 Januari 2023)

Berdasarkan hasil dari ketiga wawancara tersebut, menunjukkan bahwasannya dapat dikatakan masyarakat banyak yang tidak tau mengenai dana desa, ini menunjukkan bahwasanya transparansi yang diterapkan oleh Kepala Desa masih belum berjalan dengan baik. Dan kemudian mengenai pembangunan desa pun bisa dibilang tidak ada, dan fasilitas yang ada di Desa Selaganggeng sekarang ini, seperti jalan-jalan, saluran air, dan lain sebagainya merupakan pembangunan yang dilakukan oleh Pak Sujatmo yang merupakan Kepala Desa pada masa pemerintahan sebelumnya.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara diatas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya kemampuan Kepala Desa Selaganggeng dalam menerapkan prinsip transparansi masih kurang. Ini terlihat dari masyarakat di luar perangkat desa tidak mengetahui sama sekali mengenai anggaran desa, masyarakat hanya mengetahui bahwasanya anggaran desa digunakan untuk bantuan bagi warga terdampak pandemi. Hal ini disebabkan kurang efisiennya informasi yang diberikan pihak desa mengenai dana kepada masyarakat dan kemudian juga belum ada kejelasan mengenai data dana desa, dikarenakan belum adanya pembangunan sama sekali. Seharusnya walaupun pihak desa fokus menangani pandemi, di lain sisi masalah infrastruktur juga harus tetap diperhatikan, walaupun tidak ada pembangunan setidaknya perawatan tetap dilakukan, sehingga infrastruktur desa tetap terawat dan tidak terjadi kerusakan yang semakin parah yang tentunya nantinya akan mengganggu aktivitas keseharian masyarakat Desa Selaganggeng. Padahal dalam *governability*, tata kelola pemerintahan harus menjalankan transparansi dengan memastikan setiap anggota masyarakat memiliki informasi mengenai keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Tata kelola pemerintahan yang tidak stabil menyembunyikan informasi dari publik, dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang dapat disebut sebagai tidak demokratis, inkonstitusional dan dapat menyebabkan kekacauan publik (Kooiman, 2009).

B. Prinsip Responsif Kepala Desa dalam Menjalankan Agenda Pembangunan Infrastruktur Desa Selaganggeng

Dalam jalannya pemerintahan Desa Selaganggeng prinsip responsif menjadi salah satu hal yang sangat penting, ini dikarenakan dalam jalannya pembangunan infrastruktur desa seluruh elemen harus terlibat di dalamnya yang kemudian akan memunculkan banyak sekali saran, kritik ataupun pendapat dari berbagai elemen terutama masyarakat agar pembangunan yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sejatinya pembangunan infrastruktur menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, hal ini karena infrastruktur dapat menunjang aktivitas masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, dalam *governability*, pemerintah desa harus dapat menjalankan opini publik dengan mengelola bagian masyarakat yang paling kompleks dan memenuhi kebutuhan mereka secara normal. Bahkan dalam pemerintahan yang sangat tersentralisasi, *governability* akan selalu memastikan bahwa publik memiliki kepentingan tertinggi dalam kekuasaan dan menggunakannya secara tepat untuk mencapai kebutuhan mereka (Kooiman, 2009).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung di lapangan menunjukkan bahwasannya kemampuan Kepala Desa menerapkan prinsip responsif dalam jalannya pembangunan infrastruktur Desa Selaganggeng masih sangat kurang, hal ini dikarenakan Kepala Desa dalam penyusunan program desa hanya berfokus pada pengembangan ekonomi saja, sedangkan pembangunan infrastruktur hanya menjadi pelengkap dan bahkan bisa dibilang tidak ada. Ini dikarenakan saat Musdes ataupun Musrenbangdes masyarakat tidak dilibatkan sama sekali, hanya diwakili oleh elit desa RW dan RT masing-masing. Kemudian pada jalannya program desa ketika masyarakat menyampaikan keluhan ataupun kritik serta permasalahan infrastruktur desa tidak ditanggapi sama sekali atau tidak ada kepekaan dari pihak desa. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Selaganggeng Uut Triyas Yanuar, mengungkapkan bahwa,

"Kalau untuk program yang sedang berjalan ya tidak ada keluhan mas, semua berjalan dengan baik dan semestinya mas, biasanya kalau ada keluhan disampaikan sama pak RT atau RW mas, ha terus kan setiap awal tahun kita itu ada Musdes, Musrenbangdes dan lain sebagainya mas, disana kita musyawarah untuk program desa kedepannya mas, dalam hal ini masyarakat desa diwakili oleh RW dan RT mas, kemudian dari hasil tersebut ya semua setuju program desa untuk pengembangan ekonomi mas, kan ini juga sesuai dengan himbuan pemerintah kabupaten dan untuk pembangunan infrastruktur belum ada mas, ditambah terkendala pandemi mas" (Wawancara 3 Januari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwasanya Kepala Desa masih sangat kurang kemampuannya untuk peka dan tanggap terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat, ini dikarenakan penyusunan program desa masyarakat tidak dilibatkan langsung dan hanya diwakili oleh elit desa, yaitu RT dan RW, sehingga Kepala Desa tidak tahu apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan masyarakatnya. Dan kemudian ketika terdapat keluhan dari masyarakat bisa jadi tidak tersampaikan, dikarenakan mungkin RW dan RT tidak sempat menyampaikan karena disibukkan urusan pribadinya masing-masing. Sejalan dengan hal tersebut, hasil wawancara dengan Kasi Pelayanan Adi Risyanto, mengungkapkan bahwa,

“Ya cukup baik mas, kan sebelum membuat program desa kan ada Musrenbangdes mas, disitu Pak KADES menerima masukan- masukan gitu mas, dan semua setuju kok mas sama program desa mengenai pengembangan ekonomi desa mas, kalau masyarakat disini itu diwakili RT dan RW masing-masing mas, untuk program pembangunan tidak ada mas, prioritas desa itu mengacu pada himbauan kabupaten mas untuk pengembangan ekonomi” (Wawancara 4 Januari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwasanya Kepala Desa untuk tanggap dan peka terhadap aspirasi masyarakat sudah baik, dimana Kepala Desa menerima masukan-masukan saat Musrenbangdes, tetapi dalam Musrenbangdes tersebut masyarakat tidak dilibatkan langsung dan hanya diwakili oleh RT dan RW, tentunya dalam hal masyarakat tidak bisa menyampaikan keluhan serta kebutuhan yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga dalam Musrenbangdes tersebut tidak mewakili kebutuhan masyarakat sama sekali terutama masalah pembangunan infrastruktur desa sedangkan program desa hanya berfokus untuk pengembangan ekonomi. Tentunya permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Kepala Desa dalam hal responsif masih sangat kurang, dimana masyarakat yang menjadi indikator kepentingan tertinggi dalam pemerintahan desa justru kepentingannya tidak terwakilkan, sedangkan program yang dihasilkan oleh desa palah hanya mewakili desa semata. Ini menunjukkan bahwa kapasitas tata kelola pemerintahan Desa Selaganggeng dalam menjalankan prinsip responsif masih kurang karena aktor utama dalam pemerintahan desa, yaitu Kepala Desa kemampuannya dalam menerapkan prinsip responsif juga masih kurang. Dalam *governability*, tata kelola pemerintahan dalam hal ini pemerintahan Desa Selaganggeng harus menjalankan opini publik dengan mengelola bagian masyarakat yang paling kompleks dan memenuhi kebutuhan mereka secara normal, hal ini karena dalam *governability* akan selalu memastikan bahwa publik memiliki kepentingan tertinggi (Kooiman,2009). Hal tersebut diperkuat dari hasil wawancara dengan Ketua Karang Taruna Desa Selaganggeng Ikbar Wardede, mengungkapkan bahwa,

“Ya seperti itu mas, kurang pokoknya mas, pas Musrenbangdes itu masyarakat itu tidak dilibatkan mas, ya cuma diwakili pak RW sama RT mas dan itupun setuju-setuju saja, kemudian saja jugak usul masalah perbaikan saluran air pun tidak ada tanggapan mas malah Pak KADES bilang kalau pembangunan itu hanya sebagai pelengkap saja mas, yang utama itu katanya pengembangan ekonomi mas dan itu pun tidak ada yang memberikan tanggapan lagi selain saya sama Ketua BPD mas” (Wawancara 7 Januari 2023).

Selanjutnya sejalan hal tersebut, hasil wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Selaganggeng Tris Sugiarto, mengungkapkan bahwa,

“Menurut saya masih kurang baik mas, dari program desa saja tidak ada yang mewakili kepentingan masyarakat mas, ini dikarenakan pas penyusunan program desa masyarakat tidak terlibat langsung mas cuma diwakili RW sama RT mas dan itu tidak ada suaranya sama sekali mas hanya setuju dengan desa mas, pokoknya cuma saya dan ketua Karang Taruna mas yang memberikan saran mas untuk memasukan pembangunan infrastruktur masuk ke program desa mas, tetapi tidak ditanggapi sama Pak Kades mas, alasannya desa berfokus untuk pengembangan ekonomi mas” (Wawancara 7 Januari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dari kedua tokoh tersebut. menunjukkan bahwasannya kemampuan Kepala Desa untuk peka dan tanggap pada aspirasi masyarakat dinilai masih kurang. Ini dikarenakan dalam penyusunan program desa masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dan hanya diwakili oleh RW dan RT, sehingga masyarakat tidak bisa menyampaikan apa yang menjadi kebutuhannya dan kemudian beberapa aspirasi mengenai pembangunan infrastruktur desa sama sekali tidak ada tanggapan dari Pak Kades dengan alasan desa lebih berfokus untuk pengembangan potensi desa di sektor ekonomi, sehingga program desa yang dihasilkan sama sekali tidak mewakili apa yang menjadi kebutuhan masyarakat terutama dalam sektor pembangunan infrastruktur. Ini menunjukkan bahwa memang kemampuan Kepala Desa dalam menerapkan prinsip responsif masih kurang, dimana seharusnya dalam proses tata kelola pemerintahan desa, kepentingan tertinggi adalah kepentingan masyarakatnya, sebagaimana dalam *governability*, bahwa publik memiliki kepentingan tertinggi dalam proses tata kelola pemerintahan desa (Kooiman, 2009). Dan kemudian hal tersebut juga diperkuat dari hasil wawancara dengan warga desa RT 2/RW 3 Sugino, mengungkapkan bahwa,

"Kurang mas, kemudian program desa apa juga saya kurang paham mas, kadang masyarakat itu melapor ke Pak RT apa RW. kadang palah ke desa mas kalau ada keluhan terutama masalah jalan sama saluran air mas itu tidak ada tanggapan sama sekali mas” (Hasil Wawancara 5 Januari 2023)

Dan kemudian juga hasil wawancara dengan warga RT 3/ RW 5 Darso, mengungkapkan bahwa,

"Kalau menurut saya masih sangat kurang mas, ini dikarenakan program desa itu menurut saya hanya untuk kepentingan desa mas, sama sekali tidak mewakili masyarakat mas, kita itu pengennya ke pembangunan mas, soalnya itu tidak ada progres pembangunan sama sekali mas, terus kalau kita menyampaikan keluhan itu tidak ada tanggapan dari desa mas" (Wawancara 5 Januari 2023).

Kemudian juga sejalan dengan hal tersebut, hasil wawancara dengan warga RT 2/ RW 1 Wagiono, mengungkapkan bahwa,

"Parah sih menurut saya mas, programnya itu tidak mewakili masyarakat mas, programnya pengembangan ekonomi tapi untuk masyarakat itu tidak ada manfaatnya mas dan masyarakat juga tidak terlibat sama sekali, harusnya kan lebih ke pembangunan gitu mas kayak jalankan itu manfaatnya bisa dirasakan semua masyarakat mas, terus kalau ada keluhan itu ya parah mas kayak desa itu sama sekali tidak ada tanggapannya mas, padahal kan harusnya kan melayani masyarakat kan mas" (Wawancara 5 Januari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara ketiga warga tersebut, menunjukkan bahwasanya Kepala Desa memang kemampuan tanggap dan kepekaanya pada aspirasi masyarakat kurang baik, ini dikarenakan masyarakat tidak dilibatkan sama sekali dalam penyusunan program desa dan program desa tersebut tidak mewakili kebutuhan masyarakat serta masyarakat menilai bahwa program tersebut tidak berdampak apa-apa bagi masyarakat. Dan kemudian dalam jalannya program desa ketika ada keluhan dari masyarakat respon dari desa sangat lambat bahkan seperti tidak peduli sama sekali.

Berdasarkan hasil dari keseluruhan wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya kemampuan Kepala Desa dalam menerapkan prinsip responsif dalam menjalankan pembangunan infrastruktur Desa Selaganggang masih sangat kurang, ini dikarenakan dalam penyusunan program desa, masyarakat tidak dilibatkan langsung dalam Musrenbangdes ataupun Musdes, dimana masyarakat hanya diwakili oleh RW dan RT masing-masing, sehingga tidak bisa menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sebenarnya. Selanjutnya ketika dalam penyusunan program desa ketika ada saran dari Ketua Karang Taruna dan Ketua BPD untuk mempertimbangkan pembangunan infrastruktur tidak ditanggapi sama sekali oleh Kepala Desa dengan alasan desa berfokus untuk pengembangan sektor ekonomi yang juga sesuai dengan program kabupaten, sehingga program desa yang dihasilkan tidak mewakili kebutuhan masyarakat.

Kemudian dalam jalannya program desa ketika ada keluhan dari masyarakat terutama masalah infrastruktur respon desa sangat lambat dan bahkan terkesan tidak peduli, tentunya hal tersebut menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat dan membuat pembangunan infrastruktur di Desa Selaganggeng tidak berjalan dengan baik. Tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip responsif dalam *governability*, tata kelola pemerintahan Desa Selaganggeng harus menjalankan opini publik dengan mengelola bagian masyarakat yang paling kompleks dan memenuhi kebutuhan mereka secara normal. Bahkan dalam pemerintahan yang sangat tersentralisasi, dan juga pemerintahan Desa Selaganggeng harus selalu memastikan bahwa publik memiliki kepentingan tertinggi dalam kekuasaan dan menggunakannya secara tepat untuk mencapai kebutuhan mereka (Kooiman, 2009).

C. Prinsip Partisipatif Kepala Desa Dalam Menjalankan Pembangunan Infrastruktur Desa Selaganggeng

Dalam jalannya pembangunan infrastruktur di Desa Selaganggeng, tentunya sangat dibutuhkan partisipasi dari seluruh elemen yang ada dalam desa terutama masyarakat karena sejatinya sasaran utama pembangunan adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa, sehingga pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan tepat sasaran. Tentunya dalam menunjang hal tersebut Kepala Desa Selaganggeng harus memiliki kemampuan dalam menerapkan prinsip partisipatif dengan baik. Sejalan dengan hal tersebut dalam teori *governability* dijelaskan bahwasannya dalam berjalannya pemerintahan yang baik sangat membutuhkan partisipasi berbagai sektor dalam tatanan masyarakat Inklusif atau lebih tepatnya partisipasi berarti keterlibatan setiap anggota dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini pemerintah Desa Selaganggeng harus menyediakan lingkungan yang luas bagi setiap anggota masyarakat untuk menjadi bagian dari pemerintah dan membuat keputusan yang berkaitan dengan kemajuan masyarakat desa (Kooiman, 2009).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung di lapangan, menunjukkan bahwasannya kemampuan Kepala Desa dalam menerapkan prinsip partisipatif dalam menjalankan pembangunan infrastruktur di Desa Selaganggeng masih kurang, ini dikarenakan dalam pengambilan keputusan atau dalam pembuatan program dan kebijakan desa, masyarakat tidak dilibatkan secara langsung, dimana mereka hanya diwakili oleh elit desa, yaitu RT dan RW masing-masing. Dan kemudian program dan kebijakan desa yang dihasilkan oleh desa melalui Musrenbangdes juga tidak ada yang mewakili kepentingan masyarakat yang memang menginginkan pembangunan infrastruktur, sedangkan program desa lebih condong fokus pengembangan perekonomian desa melalui BUMDES. Dan

inilah yang kemudian membuat masyarakat mulai menurun kepercayaan kepada pihak desa dan kemudian menjadi acuh tak acuh dengan kegiatan atau program desa. Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Selaganggang Uut Triyas Yanuar, mengungkapkan bahwa,

“Ya kan ini mas setiap awal tahun kita itu ada Musdes, Musrenbangdes dan lain sebagainya mas, disana kita musyawarah untuk program desa kedepannya mas, dalam hal ini masyarakat desa diwakili oleh RW dan RT mas, kemudian dari hasil tersebut ya semua setuju program desa untuk pengembangan ekonomi mas, kan ini juga sesuai dengan himbauan pemerintah kabupaten, disini kenapa ekonomi mas, ya karena bisa berjalan secara berkelanjutan dan dapat menambah penghasilan desa, sedangkan kalau kita bangun-bangun terus kan butuh dana banyak mas ditambah belum lagi perawatannya mas, jadi ya untuk pembangunan infrastruktur belum ada mas, ditambah terkendala pandemi mas dan selama program berjalan ya sama kayak tadi mas tidak ada keluhan, semua berjalan dengan baik dan semestinya mas, biasanya kalau ada keluhan disampaikan sama pak RT atau RW mas, ha baru nantinya disampaikan ke saya seperti itu mas. ” (Wawancara 3 Januari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwasannya masyarakat Desa Selaganggang tidak dilibatkan secara langsung dalam Musdes ataupun Musrenbangdes, dimana masyarakat hanya diwakili oleh RT dan RW masing-masing. Dan kemudian apa yang menjadi program dari desa yang berfokus pada ekonomi disetujui. Fokus desa yang berfokus pada ekonomi ini berdasarkan wawancara tersebut, alasannya karena Kepala Desa meyakini bahwasannya pengembangan ekonomi itu lebih penting dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur, dikarenakan pengembangan ekonomi akan lebih baik dampaknya bagi desa, sedangkan pembangunan infrastruktur membutuhkan dana desa yang lebih besar dan setiap tahunnya akan membutuhkan perawatan yang juga memerlukan dana yang tidak sedikit. Dan kemudian program dari Kepala Desa disetujui dalam Musdes, sehingga program ekonomi menjadi yang utama di desa dan kemudian pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat hanya sebagai pelengkap saja.

Berdasarkan permasalahan di atas, menunjukkan bahwa kemampuan Kepala Desa dalam prinsip partisipatif masih kurang, ini dikarenakan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk program desa tidak dilibatkan secara langsung, dimana masyarakat hanya diwakili oleh elit desa, yaitu RT dan RW-nya masing-masing. Padahal dalam menentukan suatu program atau kebijakan desa masyarakat harus dilibatkan secara langsung karena dalam tata kelola pemerintahan desa kebutuhan masyarakat merupakan kepentingan tertinggi. Dalam *governability*,

dalam proses tata kelola pemerintahan desa sangat dibutuhkan partisipasi dari berbagai sektor masyarakat, karena sejatinya proses tata kelola pemerintahan dalam hal ini Pemerintahan Desa selaganggeng adalah bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat. sedangkan yang terjadi di Desa Selaganggeng masyarakat tidak dilibatkan langsung dalam pengambilan keputusan yang pada akhirnya kebijakan yang dihasilkan tidak tepat sasaran karena tidak mewakili kebutuhan masyarakatnya. Tentunya ini menunjukkan bahwa kapasitas tata kelola pemerintahan Desa Selaganggeng dalam prinsip partisipatif masih kurang, dimana hal ini dipengaruhi oleh aktor utama yang menjalankan, yaitu Kepala Desa masih kurang dalam menerapkan prinsip partisipatif (Kooiman, 2009). Kemudian hasil wawancara dengan Kepala Desa tersebut sejalan dengan hasil wawancara Kasi Kesejahteraan Desa Selaganggeng Fedri Wiganda, yang mengungkapkan bahwa,

“Ya sudah cukup baik mas, kan sebelum membuat program untuk desa ya mas, baik itu jangka pendek satu tahun ataupun jangka menengah lima tahun kan ada Musdes, itu kan dihadiri seluruh organisasi dan untuk masyarakat diwakili oleh RT dan RW masing-masing mas dan saya yakin juga sudah mewakili kepentingan masyarakatnya masing-masing mas” (Wawancara 5 Januari 2023).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Dusun 1 Desa Selaganggeng Sulistiana, mengungkapkan bahwa,

“Sudah baiklah mas, semua yang ada di desa dilibatkan mas dalam pembuatan program desa mas, kan kalo awal tahun itu ada Musrenbangdes ha disitu program dibuat dan disetujui mas” (Wawancara 6 Januari 2023).

Dan kemudian sejalan dengan hal tersebut hasil wawancara dengan Kepala Dusun 2 Desa Selaganggeng Sakum Abidin, mengungkapkan bahwa,

“Sudah baik mas, dalam pembuatan program desa semua ikut mengambil keputusan dan menyetujui program yang diusulkan oleh Pak Kades mas dalam Musrenbangdes” (Wawancara 6 Januari 2023).

Berdasarkan hasil dari ketiga wawancara tersebut, menunjukkan bahwasannya kemampuan partisipatif Kepala Desa sudah baik. Dimana hal ini ketika penyusunan program desa seluruh elemen masyarakat baik pihak desa, organisasi desa maupun masyarakat yang diwakili oleh RT dan RW turut andil dalam pengambilan keputusan dan menyetujui program yang diusulkan oleh Kepala Desa yang berfokus pada pengembangan ekonomi desa, sedangkan untuk pembangunan infrastruktur bisa dibilang tidak menjadi prioritas utama dalam program desa, padahal ketika melihat kondisi infrastruktur desa sudah sangat membutuhkan pembangunan ataupun renovasi karena jika tidak tentunya akan

semakin parah kondisinya, dan hal tersebut yang sebenarnya menjadi keluhan warga, tentunya menjadi hal yang aneh jika program yang dicanangkan pemerintah desa justru tidak mewakili kepentingan masyarakat desanya. Kemudian hal tersebut sejalan dari hasil wawancara dengan Ketua RW 1 Desa Selaganggang Wiryo Hadi Suwito, mengungkapkan bahwa,

“Saya rasa suda mas, program desa itu kan dibuat melalui Musrenbangdes, sehingga yang ada di desa turut andil dalam pengambilan keputusan dan menyetujui program yang diusulkan oleh Pak Kades mas dan saya yang mewakili masyarakat RW 1 juga tidak ada masalah mas, yang paling kalau ada yang protes-protes itu ya yang tidak ngerti program desa aja mas” (Wawancara 7 Januari 2023).

Dan kemudian hasil wawancara dengan Ketua RW 2 Desa Selaganggang Suyatno, mengungkapkan bahwa,

“Ya bagaimana ya mas, ya intinya ya saya sebagai Ketua RW 2 ya ngikut aja apa yang menjadi usulan Pak Kades untuk jadi program desa mas, ya walaupun terkadang banyak masyarakat mengeluhkan masalah jalan yang rusak lah mas itu sering” (Wawancara 7 Januari 2023).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ketua RW 4 Desa Selaganggang Makhful, mengungkapkan bahwa,

“Kalau saya ya ngikut Pak Kades mas, ya orangnya ngusulin program pengembangan ekonomi desa ya saya setuju-setuju saja mas, kalok pembangunan infrastruktur ya tidak ada mas ditambah ada pandemi kemarin mas jadi tidak ada mas” (Wawancara 5 Januari 2023).

Sejalan dengan hal tersebut, hasil wawancara dengan Ketua RW 5 Desa Selaganggang Puji Sumaryoto, mengungkapkan bahwa,

“Kalau saya ngikut Pak Kades mas, ya karena kemarin keputusan yang diambil dalam Musrenbangdes Pak Kades programnya ngusulin untuk pemberdayaan ekonomi ya menurut saya bagus mas, dan semua perwakilan masyarakat dan organisasi masyarakat semua setuju mas” (Wawancara 5 Januari 2023).

Berdasarkan hasil dari keempat wawancara tersebut, menunjukkan bahwasanya dalam pengambilan keputusan mengenai program desa memang melibatkan seluruh elemen yang ada di desa, yaitu pihak desa organisasi desa dan masyarakat yang diwakili RT dan RW. Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam pengambilan keputusan Kepala Desa memiliki kendali penuh untuk menentukan program atau agenda desa. Proses pengambilan

keputusannya memang melibatkan elemen yang ada di desa, tetapi usulan dari Kepala Desa langsung disetujui tanpa adanya kritik atau pendapat, terutama dari perwakilan masyarakat, yaitu RT dan RW yang padahal keputusan yang dihasilkan tidak mewakili kepentingan masyarakat yang lebih membutuhkan perbaikan infrastruktur.

Kemudian hasil wawancara dengan Sesepeuh Desa Selaganggeng Mukhtarudin, mengungkapkan bahwa,

“Ya semua setuju dengan Pak Kades, karena pengalaman beliau sebagai pembisnis yang besar dan sukses pastinya bisa memimpin desa ini menjadi lebih maju, ya kami semua dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk program desa mas, dan kami manut Pak Kades mas, karena beliau pasti tau yang terbaik untuk desa” (Wawancara 8 Januari 2023).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Desa Selaganggeng Sutanto, mengungkapkan bahwa,

“Dalam program desa kami semua dilibatkan untuk menentukan apa yang menjadi fokus desa mas, tapi kami Cuma kelompok tani ya ngikut aja Pak Kades mas, ya yang penting kita dapat dana untuk kas kelompok tani mas” (Wawancara 8 Januari 2023).

Sejalan dengan hal tersebut hasil wawancara dengan Ketua PKK Desa Selaganggeng Amalia, mengungkapkan bahwa,

“Ya semua dilibatkan mas, ya saya sebagai perwakilan dari ibu-ibu desa ya setuju dengan programnya Pak Kades mas, kan fokusnya ke pemberdayaan ekonomi jadi buat PKK bagus untuk ngembangin ibu-ibu itu loh buat ekonominya mas” (Wawancara 3 Januari 2023).

Dan kemudian hasil wawancara dengan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Selaganggeng Dimas Agus Prayogo, mengungkapkan bahwa,

“Kami setuju dengan program Pak Kades untuk pemberdayaan ekonomi desa mas, karna juga sejalan dengan LPMD untuk mengembangkan ekonomi masyarakat lebih mandiri dan maju mas” (Wawancara 11 Januari 2023).

Berdasarkan hasil dari keempat wawancara tersebut, menunjukan bahwasannya, perwakilan elemen dari masyarakat desa, menyetujui tanpa adanya kritik maupun saran dan ini mengindikasikan bahwa dalam pengambilan keputusan Kepala Desa memiliki kewenangan yang besar, sehingga apa yang kemudian Kepala Desa dirasa itu baik untuk desa, maka seluruh jajaran mengikutinya. Di lain

sisi RT dan RW yang menjadi perwakilan dari masyarakat, seharusnya bisa menyampaikan apa yang menjadi keluhan masyarakat terutama mengenai pembangunan infrastruktur yang memang sudah sangat diperlukan dalam Musdes, Muasrenbangdesa atau langsung disampaikan kepada Kepala Desa, sehingga sektor pembangunan infrastruktur bisa dipikirkan lagi untuk menjadi program desa. Hasil wawancara tersebut di atas berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh Ketua BPD Desa Selaganggeng Tris Sugiarto, dimana dalam wawancara beliau, mengungkapkan bahwa,

“Sebenarnya masih kurang sekali mas dalam menerapkan prinsip partisipatif ini. Karena masyarakat tidak dilibatkan secara langsung mas, ya kan masyarakat itu menginginkan tidak usah pembangunan lah mas, tapi setidaknya perbaikan infrastruktur desa mas terutama jalan sama saluran air mas, itu kondisinya banyak mengalami kerusakan yang cukup parah mas, maka menurut saya seharusnya yang diutamakan itu infrastruktur mas bukan ekonomi, dalam Musrenbangdes yang hadir itu semuanya setuju sama Pak Kades mas, cuma saya dan Mas Dede Ketua Karang Taruna yang kurang setuju, ya tapi mau gimana lagi akhirnya kita ya cuma bisa mengikuti mas, karena kami tidak memiliki kekuatan mas” (Wawancara 7 Januari 2023).

Kemudian sejalan dengan hal tersebut, Ketua Karang Taruna Desa Selaganggeng Ikbar Wardede, mengungkapkan bahwa,

“Ya menurut saya sangat kurang mas, itu karena program desa itu tidak mewakili kebutuhan masyarakat mas, ekonomi itu ya cuma menguntungkan pihak desa lah mas, kan dalam menjalankannya tidak membutuhkan partisipasi masyarakat mas, latar belakang Pak Kades kan pembisnis mas ya mungkin orangnya bagus dalam ekonomi, tapi tidak bisa semata-mata ke ekonomi mas kan masyarakat butuhnya infrastruktur mas jalan-jalan itu sudah banyak yang rusak parah mas, ya makanya sangat perlu perbaikan lah setidaknya mas. Dan kemudian saat pengambilan keputusan untuk kebijakan desa juga masyarakat tidak dilibatkan sama sekali mas, yang menyampaikan kritik hanya saya dan Pak Tris mas Ketua BPD, selebihnya ya setuju semua mas” (Wawancara 7 Januari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa, kemampuan Kepala Desa dalam menerapkan prinsip partisipatif masih sangat kurang, ini dikarenakan masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan, sehingga kemudian program yang dihasilkan berfokus pada pengembangan ekonomi yang dalam menjalankannya tidak terlalu dibutuhkan partisipasi masyarakat, padahal masyarakat sangat membutuhkan adanya pembangunan ataupun perbaikan infrastruktur, karena kondisi infrastruktur desa sudah mengalami kerusakan yang cukup parah. Dan kemudian dalam pengambilan

keputusan semua yang hadir dalam Musrenbangdes setuju dengan apa yang diusulkan oleh Kepala Desa, sedangkan yang kurang setuju hanya dua orang, yaitu Ketua BPD dan Karang Taruna, dan kritik dan pendapat yang disampaikan oleh mereka juga tidak dihiraukan oleh Kepala Desa, sehingga hanya bisa mengikuti karena tidak memiliki kekuatan. Ini menunjukkan bahwa kemampuan Kepala Desa dalam menerapkan prinsip partisipatif masih sangat kurang, karena kebijakan desa tidak mewakili masyarakatnya sama sekali. Dalam *governability*, dalam pengambilan keputusan sangat dibutuhkan partisipasi seluruh elemen terutama masyarakat yang memiliki kepentingan tertinggi dalam tata kelola pemerintahan desa. tentunya ini menunjukkan bahwa kapasitas tata kelola pemerintahan Desa Selaganggeng dalam prinsip partisipatif masih sangat kurang, karena aktor utama Kepala Desa belum memiliki kemampuan yang mumpuni dalam hal tersebut (Kooiman, 2009).

Dan kemudian apa yang disampaikan di atas diperkuat dari hasil wawancara dengan warga Desa Selaganggeng RT 2/ RW 1 Priyatur, mengungkapkan bahwa,

“Gimana ya mas, setahu saya kalau masyarakat itu kalau ada rapat-rapat tidak pernah ikut mas, yang rapat ya RT sama RW mas, kalau kami masyarakat biasa tidak tau apa-apa mas” (Wawancara 12 Januari 2023).

Sejalan dengan hal tersebut hasil wawancara dengan warga Desa Selaganggeng RT 3/ RW 2 Mahyanto, mengungkapkan bahwa,

“Kurang paham saya palah masalah kayak gini mas, paling kalo ada apa-apa ya RT dan RW mas, kalo kita masyarakat biasa ya nggak paham masalah kayak gitu mas” (Wawancara 12 Januari 2023).

Dan kemudian hasil wawancara dengan warga Desa Selaganggeng RT 2/ RW 3 Sartono, mengungkapkan bahwa,

“Kalau masalah kayak gitu paling RT dan RW mas, saya juga kurang paham program desa apaan mas, padahal jalan-jalan udah pada rusak sampai sekarang belum diperbaiki mas apalagi dibangun” (Wawancara 12 Januari 2023).

Dan kemudian sejalan dengan hal tersebut hasil wawancara dengan warga Desa Selaganggeng RT 2/ RW 4 Mahadi, mengungkapkan bahwa,

“Kurang paham mas, yang jelas kalau ada apa-apa itu urusan RT dan RW mas, masyarakat biasa nggak tau apa-apa mas, saya aja paling kalok ke desa itu kalau ada bantuan apa ngurus surat-surat mas” (Wawancara 12 Januari 2023).

Selanjutnya hasil wawancara dengan warga Desa Selaganggeng RT 4/ RW 5 Priyono, mengungkapkan bahwa,

“Masyarakat kalau masalah rapat nentuin program desa nggak pernah ikut mas, ya paling diwakili Pak RW atau RT paling mas, jadi masyarakat yang kurang tau program desa itu apa mas, soalnya sampai sekarang jalan-jalan rusak itu belum pernah diperbaiki selama Kepala desa Pak Uut ini mas”
(Wawancara 6 Januari 2023)

Berdasarkan hasil dari kelima wawancara warga Desa Selaganggeng tersebut, menunjukkan bahwasannya, masyarakat Desa Selaganggeng tidak dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan untuk menentukan program desa, dimana masyarakat hanya diwakili oleh RT dan RW-nya masing-masing. Dan kemudian saat pengambilan keputusan pun seluruh RW maupun RT setuju dengan program Kepala Desa untuk pengembangan ekonomi desa tanpa adanya kritik dan saran padahal sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat ialah perbaikan atau pembangunan infrastruktur desa, tetapi palah palah program yang difokuskan oleh desa yaitu pengembangan ekonomi yang bisa dibilang tidak terlalu dibutuhkan oleh masyarakat desa.

Berdasarkan hasil dari keseluruhan wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasannya kemampuan Kepala Desa menerapkan prinsip partisipatif dalam menjalankan pembangunan infrastruktur di Desa Selaganggeng masih sangat kurang, ini bisa dilihat bahwasannya dalam pengambilan keputusan atau dalam pembuatan program dan kebijakan desa, masyarakat tidak dilibatkan secara langsung, dimana mereka hanya diwakili oleh elit desa, yaitu RT dan RW masing-masing. Dan kemudian program dan kebijakan desa yang dihasilkan oleh desa melalui Musrenbangdes juga tidak ada yang mewakili kepentingan masyarakat yang memang menginginkan pembangunan infrastruktur, sedangkan program desa lebih condong fokus pengembangan perekonomian desa melalui BUMDES. Dan kemudian dari hasil keseluruhan wawancara tersebut menunjukkan bahwa Kepala Desa dalam pengambilan keputusan memiliki kewenangan hak ya sangat besar atau bisa dibilang Kepala Desa menjadi sosok utama dalam menentukan kebijakan desa. tentunya hal tersebut membuat pemerintahan desa berjalan kurang baik, dikarenakan keputusan yang diambil tidak mewakili kepentingan masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak tepat sasaran. Dan inilah yang kemudian membuat masyarakat mulai menurun kepercayaan kepada pihak desa dan kemudian menjadi acuh tak acuh dengan kegiatan atau program desa. Padahal dalam *governability*, tata kelola pemerintahan sangat membutuhkan partisipasi berbagai sektor dalam tatanan masyarakat Inklusif atau lebih tepatnya partisipasi berarti keterlibatan setiap anggota dalam proses pengambilan keputusan. Tata kelola pemerintahan harus menyediakan lingkungan yang luas bagi setiap anggota

masyarakat untuk menjadi bagian dari pemerintah dan membuat keputusan yang berkaitan dengan kemajuan masyarakat (Kooiman, 2009).

BAB V

KEMAMPUAN INTERAKSI DAN KERJASAMA KEPALA DESA UUT TRIYAS YANUAR DALAM MENJALANKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA SELAGANGGENG

Dalam jalanya pemerintahan Desa Selaganggeng kemampuan interaksi dan kerjasama menjadi suatu hal yang sangat penting, ini dikarenakan interaksi yang baik dengan berbagai elemen di desa, seperti dengan BPD, LPMD, Karang Taruna, Remaja, dan organisasi-organisasi desa serta dengan masyarakat tentunya menjadi sebuah kunci yang kemudian dapat memunculkan kerjasama yang baik dengan gotong-royong untuk kemajuan infrastruktur desa, sehingga akan menimbulkan interaksi yang semakin baik antara masyarakat dan desa yang nantinya dapat mengurangi permasalahan mengenai keanekaragaman yang membuat hubungan masyarakat dan desa semakin renggang yang kemudian menyebabkan masyarakat dan desa menjalani kebutuhannya masing-masing, kemudian juga permasalahan mengenai kompleksitas yang menyebabkan tidak adanya saling ketergantungan antara masyarakat dan desa dapat diatasi serta permasalahan mengenai dinamika dalam masyarakat yang membuat adanya jenjang antara masyarakat dan desa dapat diantisipasi. Kemudian jugak Kepala Desa Uut Triyas Yanuar harus memiliki kemampuan yang baik dalam menjalin kerjasama dengan pihak luar desa, supaya pembangunan infrastruktur Desa Selaganggeng mengalami perkembangan yang lebih baik.

Sejalan dengan permasalahan tersebut, dalam teori *governability* sangat dibutuhkan adanya interaksi yang dilakukan oleh pelaku utama, yakni dalam konteks penelitian ini ialah Kepala Desa Selaganggeng Uut Triyas Yanuar. Hal ini dikarenakan kemampuan interaksi dan kerjasama Kepala Desa dalam menjalankan pembangunan infrastruktur desa, sehingga akan ada keragaman pola interaksi yang mungkin dapat terjadi, dan karena sifat interaksi yang memungkinkan, tidak akan ada dinamika yang kuat berdasarkan ketegangan yang terjadi dalam interaksi. Pemerintah desa dalam hal ini yang dipegang oleh Kepala Desa Uut Triyas Yanuar akan menunjukkan berbagai profil keberagaman, dinamika dan kompleksitas, tergantung bagaimana interaksi yang diterapkan oleh Kepala Desa. Dari interaksi tersebut nantinya akan memicu terjadinya kerjasama dari berbagai pihak, baik dalam desa maupun luar desa untuk bagaimana infrastruktur dapat berkembang dengan baik (Kooiman, 2003).

A. Interaksi Kepala Desa Uut Triyas Yanuar Dalam Menjalankan Pembangunan Infrastruktur Desa Selaganggeng

Kemampuan interaksi Kepala Desa Uut Triyas Yanuar menjadi hal yang sangat penting atau bisa dibilang hal yang paling penting, hal ini dikarenakan tanpa adanya interaksi yang baik tidak akan terjalin yang namanya kerjasama yang tentunya akan menyebabkan terhambatnya pembangunan infrastruktur desa, yang paling parah adalah turunya kepercayaan masyarakat desa dengan pihak pemerintah desa, karena jika interaksi yang dilakukan buruk partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan menurun, sehingga nantinya kebijakan desa tidak akan tepat sasaran dan apabila sudah berjalan akan mengalami banyak sekali hambatan. dalam teori *governability* sangat dibutuhkan adanya interaksi yang dilakukan oleh pelaku utama, yakni dalam konteks penelitian ini ialah Kepala Desa Selaganggeng Uut Triyas Yanuar. Hal ini dikarenakan kemampuan interaksi dan kerjasama Kepala Desa dalam menjalankan pembangunan infrastruktur desa, sehingga akan ada keragaman pola interaksi yang mungkin dapat terjadi, dan karena sifat interaksi yang memungkinkan, tidak akan ada dinamika yang kuat berdasarkan ketegangan yang terjadi dalam interaksi. Pemerintah desa dalam hal ini yang dipegang oleh Kepala Desa Uut Triyas Yanuar akan menunjukkan berbagai profil keberagaman, dinamika dan kompleksitas, tergantung bagaimana interaksi yang diterapkan oleh Kepala Desa (Kooiman, 2003). Dalam penelitian ini penulis akan berfokus pada bagaimana interaksi yang dilakukan Kepala Desa Uut Triyas Yanuar dengan birokrasi desa atau perangkat desa, BPD dan masyarakat. Dimana dari interaksi tersebut nantinya akan memicu terjadinya kerjasama untuk bagaimana infrastruktur Desa Selaganggeng dapat berkembang dengan baik.

1. Interaksi Kepala Desa Uut Triyas Yanuar dengan Birokrasi Desa atau Perangkat Desa Selaganggeng

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung di lapangan, menunjukkan bahwasannya kemampuan interaksi Kepala Desa Uut Triyas Yanuar terutama dengan birokrasi atau perangkat desa sudah cukup baik, ini dikarenakan interaksi yang dilakukan oleh Kepala Desa dengan anggotanya sudah berjalan cukup baik, dimana ketika ada tugas atau kepentingan yang diamanahkan kepada jajarannya dapat disampaikan dengan baik. Kemudian ketika terdapat masalah atau konflik yang terjadi diantara sesama perangkat desa dapat diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan. Dan kemudian posisi Kepala Desa Uut Triyas Yanuar yang merupakan seorang pembisnis, tentunya membuat beliau disibukkan dengan

pekerjaannya, sehingga kemudian membuat Kepala Desa jarang sekali ada di kantor Kepala Desa. Dan agar pemerintahan Desa Selaganggeng dapat berjalan dengan normal, maka beliau mempercayakan aktivitas di Pemerintahan Desa Selaganggeng kepada Sekretaris Desa Selaganggeng, yaitu Maria Murtini untuk mengambil alih seluruh kegiatan di Kantor Kepala Desa. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Selaganggeng Uut Triyas Yanuar, mengungkapkan bahwa,

“Kalau saya ke Balai Desa saja jarang mas, ya selain ngurusin desa saya harus ngurusin bisnis lelang mebel sama bisnis mebel ini mas, jadi saya jarang ke balai desa mas. Dan kemudian kalau saya tidak di kantor ya saya biasanya chat buk Sekdes buat ambil alih kegiatan di kantor mas, jadi walaupun tidak ada saya ya tetap berjalan normal mas, untuk masalah konflik ya gimana ya mas, intinya kalau ada konflik antar perangkat desa biasanya saya akan temukan yang bermasalah kemudian diselesaikan secara kekeluargaan, dan ketika ada tugas juga seluruh perangkat Desa Selaganggeng sudah cukup baik dalam pelaksanaannya, ya paling kalau ada kendala dan tidak bisa dicarikan solusinya baru nanti saya turun tangan mas” (Wawancara 3 Januari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwasannya Kepala Desa Uut Triyas Yanuar interaksinya dengan perangkat desa sudah cukup baik, dimana beliau yang bisa dibilang sangat sibuk dengan bisnisnya akhirnya membuat beliau jarang sekali ke kantor desa, dan kemudian ketika Kepala Desa tidak dapat hadir ke kantor, maka beliau mengirim pesan chat kepada Sekretaris Desa untuk mengambil alih seluruh kegiatan di kantor Kepala Desa, sehingga kegiatan di Kantor Desa tetap berjalan normal. Dan kemudian jika terjadi konflik yang melibatkan sesama perangkat desa, maka akan diselesaikan secara kekeluargaan oleh Kepala Desa, yaitu dengan cara mempertemukan perangkat desa yang bermasalah dan kemudian akan diselesaikan secara kekeluargaan. Selanjutnya ketika ada tugas atau amanah yang diembankan kepada perangkat desa dapat dijalankan dengan baik, tentunya ini menunjukkan bahwa interaksi antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa sudah cukup baik. Dan kemudian ketika ada kendala dalam pelaksanaan tugas yang tidak dapat ditemukan solusinya, maka akan diselesaikan oleh Kepala Desa. sejalan dengan hal tersebut, hasil wawancara dengan Kasi Pelayanan Desa Selaganggeng Adi Risyanto, mengungkapkan bahwa,

“Interaksi yang dilakukan oleh Pak Kades sudah cukup baik mas, memang orangnya jarang di kantor mas, makanya kalo urusan desa pas orangnya tidak ada itu diserahkan ke Buk Sekdes mas, orangnya kan pembisnis mas jadi sibuk dan jarang ke kantor, dan kalau ada acara sedangkan Pak Kades

tidak ada atau berhalangan hadir juga ya diwakilin Buk Sekdes mas dan kalau untuk masalah konflik itu hampir tidak ada mas, kalau ada konflik itu biasanya diselesaikan secara kekeluargaan sama Pak Kades mas. Terus kalau ada tugas disampaikan dengan baik sama orangnya dan cukup sesuai dengan bidang kita sebagai perangkat desa mas” (Wawancara 4 Januari 2023).

Kemudian sejalan dengan hal tersebut hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Selangngeng Maria Murtini, mengungkapkan bahwa,

“Kalau masalah interaksi sama perangkat desa ya sudah cukup baik mas, orangnya kan pembisnis mas, jadi jarang ada di kantor, biasanya orangnya kalau ada kegiatan atau tidak bisa ke kantor chat saya untuk menghandle kegiatan di balai desa ini mas, jadi walaupun tidak ada Pak Kades aktivitas di Kantor Desa tetap berjalan normal. Dan kemudian untuk konflik yang jelas diselesaikan secara kekeluargaan mas dan untuk pemberian tugas juga sudah cukup baik serta sesuai dengan bidangnya masing-masing perangkat desa mas” (Wawancara 5 Januari 2023).

Sejalan dengan hal tersebut hasil wawancara dengan Kaur Tata Usaha dan Umum Sunedi Adi Sucipto, mengungkapkan bahwa,

“Ya sudah baiklah mas, cuma orangnya sangat sibuk mas jadi jarang ke kantor, makanya biasanya Pak Kades itu ngabarin kalau nggak bisa ke kantor sama Buk Sekdes mas, jadi ketika orangnya tidak ada di kantor diambil alih oleh buk sekdes mas untuk kegiatan di balai desa, sehingga kegiatan tetap berjalan dengan baik mas, terus kalau untuk tugas penyampaianya sudah baik dan kalau konflik juga penyelesaiannya sudah baik mas secara kekeluargaan” (Wawancara 8 Januari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwasanya interaksi yang dilakukan oleh Kepala Desa Uut Triyas Yanuar dengan perangkat desa sudah cukup baik, dimana ketika beliau tidak bisa hadir ke kantor, maka akan langsung memberitahu Sekdes untuk mengambil alih kegiatan di balai desa, sehingga kegiatan dapat berjalan seperti biasa. Dan kemudian ketika terdapat konflik yang melibatkan sesama perangkat desa dapat selesai dengan baik secara kekeluargaan. Selanjutnya ketika tugas atau amanah yang diberikan untuk perangkat desa juga interaksinya sudah cukup baik, dimana tugas yang diberikan sesuai dengan bidang masing-masing perangkat desa, sehingga tugas yang diberikan dapat berjalan dengan baik. Tetapi di lain sisi Kepala Desa sibuk dengan urusan pribadinya sebagai pembisnis, padahal seharusnya Kepala Desa harus

menomorsatukan kepentingan desa diatas kepentingan pribadi sebagaimana yang telah diamanatkan sebagai pemimpin desa, sehingga tidak menyebabkan asumsi-asumsi negatif dari masyarakat yang mana dapat membuat hubungan masyarakat dengan desa tersekat, karena masyarakat menganggap Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada desa, tentunya hal tersebut nantinya dapat memicu tidak terjadinya kerjasama antara desa dan masyarakat, sehingga pembangunan infrastruktur tidak akan berjalan.

2. Interaksi Kepala Desa Uut Triyas Yanuar dengan Badan Permusyawaratan Desa Selaganggeng

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung, menunjukkan bahwa kemampuan interaksi Kepala Desa Uut Triyas Yanuar dengan Badan Permusyawaratan Desa masih sangat kurang. Ini dikarenakan hampir tidak ada saling berbaur, interaksi ataupun silaturahmi dalam kegiatan sehari-hari ataupun kegiatan desa, dimana hal tersebut terjadi karena Kepala Desa disibukan dengan pekerjaannya sendiri, sehingga Kepala Desa sangat jarang berbaur dengan BPD dan paling bertemu di acara formal seperti ketika ada rapat, pertemuan, tamu ataupun ketika ada rapat-rapat tertentu. Tentunya ini menyebabkan kerenggangan antara BPD dan Kepala Desa yang menyebabkan tidak terjadi interaksi antara keduanya. Hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Selaganggeng Trias Sugiarto, mengungkapkan bahwa,

“Ya interaksi yang dilakukan Pak Kades sangat kurang mas, orangnya jarang sekali berbaur mas, ya mungkin karena orangnya sibuk mas jadi sangat kurang interaksinya baik sama masyarakat dan organisasi desa mas, sama BPD pun jarang sekali mas paling kalau ada rapat atau apalah baru bisa kumpul mas, sehingga kita sulit untuk merembuk dan memberikan pendapat mengenai kebutuhan desa mas. Ditambah program desa yang menurut saya ya tidak pas sama kebutuhan masyarakat mas, kan masyarakat kan butuhnya perbaikan infrastruktur mas, kayak jalan itu sedangkan desa itu kekeh sama ekonomi mas, ya saya kadang bilang langsung ke orangnya mas kalau infrastruktur jalan ataupun saluran air dan lainnya itu diperbaiki tapi ya nggak tidak ditanggapi mas” (Wawancara 7 Januari 2023).

Hal tersebut diperkuat dengan dari hasil wawancara dengan Ketua Karang Taruna Desa Selaganggeng Ikar Wardede, mengungkapkan bahwa,

“Ya kurang mas, ya bisa dibilang jarang sekali mas Pak Kades berinteraksi dengan masyarakat mas, nemuin orangnya aja susah sekali mas, interaksi dengan kita aja itu kalau ada kegiatan besar aja mas” (Wawancara 7 Januari 2023).

Berdasarkan hasil dari kedua wawancara tersebut, menunjukkan bahwasannya interaksi yang dilakukan Kepala Desa Uut Triyas Yanuar dengan Badan Permusyawaratan Desa masih sangat kurang. Ini dikarenakan Kepala Desa jarang sekali berbaur, berinteraksi ataupun bersilaturahmi BPD, sehingga kemudian membuat Kepala Desa tidak mengetahui apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Dan kemudian latar belakang Kepala Desa yang merupakan pembisnis membuat pandangan Kepala Desa bahwasannya pengembangan ekonomi desa menjadi hal sangat penting dibandingkan kebutuhan infrastruktur masyarakat yang justru kemudian membuat kepentingan antara desa dan masyarakat tidak cocok dan tentunya hal tersebut membuat tidak terjadinya kerjasama antara masyarakat dan desa, karena pengembangan ekonomi dapat dijalankan tanpa melibatkan masyarakat. Dalam *governability*, tata kelola pemerintahan yang baik, seharusnya melibatkan seluruh elemen yang ada dalam masyarakat, sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran dan mewakili kepentingan masyarakat dan pada akhirnya tidak terjadi kerjasama yang baik antara desa dan masyarakat (Kooiman, 2009).

3. Interaksi Kepala Desa Uut Triyas Yanuar dengan Masyarakat Desa Selangngeng

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung, menunjukkan bahwa kemampuan interaksi Kepala Desa dengan masyarakat masih sangat kurang, ini dikarenakan Kepala Desa yang disibukkan dengan pekerjaannya sebagai pembisnis, sehingga membuat Kepala Desa sangat jarang sekali berbaur dengan masyarakat yang kemudian membuat terjadi kerenggangan antara desa dan masyarakat. Kepala Desa yang sangat jarang berbaur dengan masyarakat membuat Kepala desa tidak mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakatnya. Ditambah masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dalam Musrenbangdes, sehingga kebijakan atau program yang dihasilkan tidak mewakili kepentingan masyarakat dan akhirnya menyebabkan tidak terjadinya kerjasama antara masyarakat dan desa, dikarenakan tidak ada interaksi sama sekali. Hasil wawancara dengan warga RT 2/ RW 1 Desa Selangngeng Sutini, mengungkapkan bahwa,

“Kalau Pak Kades itu jarang sekali berbaur dengan masyarakat mas, ya mungkin orangnya sibuk paling mas kan pembisnis orangnya mas, terus pas ke balai desa kayak ngurus-ngurus surat juga jarang banget ada mas, yang rajin di kantor itu Buk Sekdes mas” (Wawancara 10 Januari 2023).

Kemudian hasil wawancara dengan warga RT 1/ RW 2 Desa Selagangeng Kasman, mengungkapkan bahwa,

“Jarang banget mas, Pak Kades jarang sekali berbaur sama masyarakat mas, terus kalau pembangunan itu tidak ada setau saya mas makanya tidak ada gotong-royong dalam masyarakat mas” (Wawancara 10 Januari 2023).

Sejalan dengan hal tersebut hasil wawancara dengan warga RT 3/ RW 3 Mustoli, mengungkapkan bahwa,

“Pak Kades itu kan pembisnis ya mas jadinya mungkin sibuk jadi jarang sekali berbaur dengan masyarakat mas, paling saya tau itu ketika ada acara-acara kayak sosialisasi gitu mas, itu juga kadang Buk Sekdes mas” (Wawancara 11 Januari 2023)

Dan Kemudian hasil wawancara dengan warga RT 1/ RW 5 Budi, mengungkapkan bahwa,

“Jarang sekali mas, mungkin ya pembisnis jadi sibuk mas, saya juga sering liat orangnya ke luar daerah kayak Jogja, Bandung terus Solo kek gitu mas, ya mungkin bisnisnya padet mas jadi jarang berbaur sama masyarakat mas” (Wawancara 11 Januari 2023).

Berdasarkan hasil keempat wawancara tersebut, menunjukkan bahwasannya kemampuan Kepala Desa dalam berinteraksi dengan masyarakat masih sangat kurang, ini dikarenakan Kepala Desa jarang sekali berbaur dengan masyarakat, dikarenakan Kepala Desa disibukan dengan kepentingan pribadinya sendiri sebagai seorang pembisnis, tentunya hal tersebut tidak mencerminkan sikap kepemimpinan yang baik, dikarenakan tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai Kepala desa dengan baik dan kemudian selama kepemimpinan Kepala Desa Uut Triyas Yanuar pembangunan infrastruktur tidak berjalan sama sekali, padahal permasalahan tersebutlah yang menjadi kebutuhan masyarakat dan pada akhirnya tidak terjalin sama sekali kerjasama antara desa dan masyarakat. Dalam *governability*, interaksi dengan masyarakat sangat diperlukan, ini dikarenakan tujuan dari tata kelola pemerintahan desa adalah bagaimana untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, dimana hal tersebut tentunya sangat ditentukan lagi-lagi oleh aktor utamanya,

yaitu Kepala Desa, karena jika kemampuan interaksi Kepala Desa dengan masyarakatnya kurang, maka hal tersebut juga akan mempengaruhi tata kelola pemerintahan desa juga (Kooiman, 2009).

Berdasarkan dari hasil keseluruhan wawancara tersebut menunjukkan bahwasannya kemampuan interaksi Kepala Desa Uut Triyas Yanuar dalam pembangunan infrastruktur di Desa Selaganggeng masih sangat kurang, walaupun interaksinya sudah cukup baik, terutama kemampuan interaksi Kepala Desa dengan birokrasi desa atau perangkat desa sudah cukup baik. Tapi di lain sisi, interaksi yang dilakukan oleh Kepala Desa masih kurang baik, terutama kurangnya interaksi dengan masyarakat, BPD dan organisasi lainnya. Hal tersebut kemudian memunculkan permasalahan baru, dimana saat ini pengambilan keputusan mengenai program desa, masyarakat tidak dilibatkan langsung dalam pengambilan keputusan, sehingga kemudian program yang dihasilkan tidak mewakili kebutuhan masyarakat dan program tersebut bisa dijalankan tanpa melibatkan masyarakat desa, hal inilah yang kemudian menambah kerenggangan antara masyarakat dan desa, yang kemudian membuat interaksi Kepala Desa semakin minim, sehingga pada akhirnya menyebabkan tidak ada kerjasama antara desa dan masyarakat. Tentunya permasalahan tersebut menimbulkan keanekaragaman dalam Desa Selaganggeng, dimana pihak desa dan masyarakat mempertahankan citra diri mereka masing-masing karena tidak adanya kecocokan kepentingan antara desa dan masyarakat, sehingga akan menimbulkan permasalahan yang kompleks, dimana membuat tidak adanya saling ketergantungan antara desa dan masyarakat karena desa bisa menjalankan programnya tanpa melibatkan masyarakat sedangkan masyarakat tidak peduli dengan desa yang pada akhirnya tidak terjadi kerjasama antara masyarakat dan desa (Kooiman, 2009).

B. Kerjasama Kepala Desa Uut Triyas Yanuar dengan Pihak Luar dalam Menjalankan Pembangunan Infrastruktur Desa Selaganggeng

Kemampuan Kerjasama Kepala Desa Uut Triyas Yanuar akan menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung pembangunan desa agar dapat berkembang lebih baik lagi, terutama kemampuan Kepala Desa bekerja sama dengan pihak luar desa. Dengan baiknya kerjasama dengan luar desa baik dengan desa lain atau lembaga-lembaga tertentu akan sangat bagus sekali dampaknya untuk pembangunan desa, karena dengan begitu Desa Selaganggeng dapat keuntungan-keuntungan seperti hibah, dana bantuan dan lain sebagainya. Dimana hal tersebut akan membuat interaksi Desa Selaganggeng dengan luar akan semakin baik dan

nantinya akan memicu terjadinya kerjasama desa dengan luar desa untuk bagaimana infrastruktur dapat berkembang dengan baik (Kooiman, 2003).

Di Desa Selaganggeng Kemampuan Kepala Desa dalam mengembangkan dan memperluas kerjasama dengan pihak luar sudah cukup baik untuk mendukung pembangunan, ini dapat terlihat dari kerja sama antara desa dengan salah satu perguruan tinggi untuk renovasi dan penataan tribun di lapangan sepak bola desa, serta Kepala Desa juga berhasil meyakinkan salah satu pabrik kecantikan dengan produknya bulu mata untuk membuka cabang di Desa Selaganggeng. Tentunya hal tersebut menjadi hal yang cukup baik bagi desa karena dapat memperbaiki fasilitas olahraga desa serta dibangunnya pabrik kecantikan dapat menyerap tenaga kerja dari desa dan mengurangi pengangguran serta menekan angka kemiskinan di Desa Selaganggeng. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Selaganggeng Uut Triyas Yanuar, mengungkapkan bahwa,

“Ya alhamdulillah lah mas, kami dari pihak desa telah bekerja sama untuk renovasi lapangan bola penataan tribun mastu kerjasama dengan UNSOED Purwokerto mas, sehingga nantinya desa ini bisa dijadikan tempat KKN tematik bagi mahasiswa UNSOED mas, terus juga kumi alhamdulillah bisa meyakinkan salah satu pabrik kecantikan di Purbalingga untuk membuka cabang di desa ini mas sehingga nantinya bisa mengurangi pengangguran mas” (Wawancara 3 Januari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwasanya kerja sama dengan pihak luar yang dilakukan oleh Kepala Desa sudah cukup baik dimana ini terlihat pihak desa telah bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi ternama di Purwokerto untuk merenovasi lapangan bola desa serta dapat meyakinkan pabrik kecantikan di Purbalingga untuk membuka cabang di Desa Selaganggeng yang tentunya hal tersebut dapat menjadi keuntungan yang bagi desa karena bisa mengurangi pengangguran di desa serta menekan kemiskinan. Tentunya hal tersebut menjadi Langkah yang sangat baik dari pemerintahan Desa Selaganggeng karena mampu bekerja sama dengan pihak ketiga untuk kemajuan infrastruktur desa dalam hal ini sarana olahraga dan rencana pembangunan pabrik. Sejalan dengan hal tersebut, hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan Desa Selaganggeng Intan, mengungkapkan bahwa,

“Sudah cukup bagus mas, ini karena latarbelakang Kepala Desa seorang pebisnis jadi dalam hal relasi jugak bagus mas, untuk kerja sama dengan pihak luar desa telah menjalin kerja sama dengan salah satu perguruan tinggi annik merenovasi lapangan sepak bola mas terus ini mas Kepala Desa itu

relasi bisnisnya banyak ha terus belum lama ini Kepala Desa berhasil meyakinkan pabrik kecantikan untuk membuka cabang di desa ini mas seperti itu mas” (Wawancara 6 Januari 2023).

Hal tersebut juga diperkuat dari hasil wawancara dengan Kepala Dusun 3 Desa Selaganggeng Arif Chrisma Y, mengungkapkan bahwa,

“Sudah cukup baik mas. Kepala desa itu kan pebisnis mas jadi pintar untuk kerja sama mas, kita desa telah menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi UNSOED dan pabrik kecantikan untuk membuka cabang di desa ini mas” (Wawancara 6 Januari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwasanya Kepala Desa dalam hal kerjasama dengan pihak luar sudah bagus, ini terlihat dengan adanya kerjasama antara desa dengan salah satu Perguruan Tinggi ternama untuk merenovasi lapangan bola desa serta bekerja sama dengan pabrik kecantikan di Purbalingga untuk membuka cabang di Desa Selaganggeng. Kemampuan Kerjasama Kepala Desa Uut Triyas Yanuar sudah cukup baik dalam hal ini dan tentunya akan menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung pembangunan desa agar dapat berkembang lebih baik lagi, terutama sarana olahraga yang memang menjadi kebutuhan masyarakat bersama dan kemudian jika dibangun pabrik tentunya juga akan sangat berdampak baik bagi perekonomian desa karena akan mengurangi pengangguran desa, sehingga dengan begitu Desa Selaganggeng dapat keuntungan-keuntungan seperti hibah, dana bantuan dan lain sebagainya. Dimana hal tersebut akan membuat interaksi Desa Selaganggeng dengan luar akan semakin baik dan nantinya akan memicu terjadinya kerjasama desa dengan luar desa untuk bagaimana infrastruktur dapat berkembang dengan baik (Kooiman, 2003). Hal tersebut diperkuat dari hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Selaganggeng Tris Sugiarto, mengungkapkan bahwa,

“Sudah cukup baik mas kalau masalah kerjasama dengan pihak luar mas karena ya Kepala Desa pebisnis mas jadi cukup lihai dalam jalin kerjasama mas, ini terlibat dari adanya kerjasama desa dengan UNSOED untuk merenovasi lapangan bola mas sama nantinya akan dibangun pabrik kecantikan di Desa Selaganggeng mas dan temanya sangat bagus bagi desa untuk mengurangi pengangguran mas” (Wawancara 7 Januari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwasanya Kepala Desa dalam menjalin kerjasama dengan pihak luar kemampuannya sudah cukup baik, ini terlihat bahwa phak desa bisa menjalin kerjasama dengan salah satu perguruan tinggi untuk merenovasi lapangan bola desa serta bekerja sama dengan

pabrik kecantikan untuk membuka cabang di Desa Selaganggeng. Kemudian sejalan dengan hal tersebut, hasil wawancara dengan warga RT 1/ RW 2 Desa Selaganggeng Katno. mengungkapkan bahwa,

“Kurang paham saya mas, taunya ini mas mau dibangun pabrik kecantikan mas di Desa Selaganggeng, menurut saya itu cukup bagus mas untuk mengurangi pengangguran lah setidaknya mas” (Wawancara 9 Januari 2023)

Dan kemudian hasil wawancara dengan warga RT 4/ RW 3 Desa Selaganggeng Taufik, mengungkapkan bahwa,

“Ya baguslah mas setau saya Kepala Desa orang kaya mas pebisnis mas jadi pintar kerjasama mas yang saya tau itu lapangan bola mau direnovasi kerjasama dengan salah satu kampus mas, terus juga mau dibangun pabrik di desa mas, menurut saya sudah bagus mas” (Wawancara 9 Januari 2023).

Dan kemudian hasil wawancara dengan warga RT 3/ RW 5 Desa Selaganggeng Tukino, mengungkapkan bahwa,

“Kepala Desa itu pebisnis paling kaya disini mas, jadi banyak relasi mas jadi bagus kalau masalah kerjasama dengan pihak luar mas, yang saya tau mau dibangun pabrik kecantikan mas dan ini menurut saya sangat bagus mas karena bisa mengurangi pengangguran di desa mas (Wawancara 11 Januari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga warga desa tersebut, menunjukkan bahwasanya Kepala Desa dalam hal kerjasama dengan pihak luar sudah cukup baik, ini terlihat dengan adanya kerjasama desa dengan perguruan tinggi untuk merenovasi lapangan bola dan akan dibangunnya pabrik kecantikan di Desa Selaganggeng yang tentunya akan berdampak baik bagi desa untuk mengurangi pengangguran.

Berdasarkan hasil dari keseluruhan wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya kemampuan Kepala Desa untuk mengembangkan dan memperluas kerjasama Kepala Desa dengan pihak luar untuk mendukung pembangunan desa sudah cukup baik, ini terlihat dari adanya kerjasama antara desa dengan salah satu perguruan tinggi ternama di Purwokerto UNSOED, untuk merenovasi lapangan sepakbola serta dijadikannya Desa Selaganggeng untuk lokasi KKN tematik. Dan kemudian Kepala Desa berhasil meyakinkan dan bekerjasama dengan pabrik kecantikan di Purbalingga untuk membuka cabang dan membangun

pabrik di Desa Selaganggeng, tentunya hal tersebut akan berdampak baik bagi desa karena akan mengurangi pengangguran serta dapat menekan angka kemiskinan desa. Tentunya diharapkan hal tersebut dapat menjadi titik terang agar hubungan pemerintah desa dan masyarakat dapat lebih dekat dan memunculkan titik temu kepentingan masing-masing pihak agar kedepannya pembangunan infrastruktur di Desa Selaganggeng dapat lebih berkembang.

Tetapi di lain sisi, seharusnya Kepala Desa juga harus bisa mengembangkan infrastruktur desa yang memang menjadi kebutuhan masyarakat, karena bagusnya infrastruktur olahraga desa tanpa diimbangi infrastruktur lainnya, maka belum bisa dikatakan berdampak baik bagi infrastruktur desa, karena infrastruktur yang benar-benar memang dibutuhkan masyarakat tidak mengalami perkembangan sama sekali. Kemampuan Kerjasama Kepala Desa Uut Triyas Yanuar akan menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung pembangunan desa agar dapat berkembang lebih baik lagi, terutama kemampuan Kepala Desa bekerja sama dengan pihak luar desa. Dengan baiknya kerjasama dengan luar desa baik dengan desa lain atau lembaga-lembaga tertentu akan sangat bagus sekali dampaknya untuk pembangunan desa, karena dengan begitu Desa Selaganggeng dapat keuntungan-keuntungan seperti hibah, dana bantuan dan lain sebagainya. Dimana hal tersebut akan membuat interaksi Desa Selaganggeng dengan luar akan semakin baik dan nantinya akan memicu terjadinya kerjasama desa dengan luar desa untuk bagaimana infrastruktur dapat berkembang dengan baik (Kooiman, 2003).

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab empat dan lima, maka penulis menyimpulkan bahwa buruknya pembangunan infrastruktur di Desa selaganggeng disebabkan oleh Kapasitas Kepemimpinan Kepala Desa dalam menjalankan pembangunan infrastruktur di Desa Selaganggeng masih sangat kurang. Dimana hal tersebut disebabkan oleh:

1. Kemampuan Kepala Desa dalam menerapkan prinsip transparansi, responsif dan partisipatif masih sangat kurang, ini dikarenakan kurang efisiennya informasi yang diberikan pihak desa mengenai dana kepada masyarakat dan kemudian juga belum ada kejelasan mengenai data dana desa. Dalam Musdes ataupun Musrenbangdes masyarakat tidak dilibatkan sama sekali, hanya diwakili oleh elit desa RW dan RT masing-masing. Kemudian pada jalannya program desa ketika masyarakat menyampaikan keluhan ataupun kritik serta permasalahan infrastruktur desa tidak ditanggapi sama sekali atau tidak ada kepekaan dari pihak desa. Dalam pengambilan keputusan dan kebijakan desa, masyarakat tidak dilibatkan secara langsung, dimana hanya diwakili oleh RT dan RW. Sehingga program desa yang dihasilkan melalui Musrenbangdes tidak mewakili kepentingan masyarakat dan dalam pengambilan keputusan Kepala Desa memiliki kewenangan hak ya sangat besar atau bisa dibilang Kepala Desa menjadi sosok utama dalam menentukan kebijakan desa.
2. Kemampuan Kepala Desa Uut Triyas Yanuar dalam menerapkan interaksi masih sangat kurang, walaupun interaksinya dengan birokrasi desa atau perangkat desa sudah cukup baik. Tapi di lain sisi, interaksi dengan masyarakat, BPD dan organisasi lainnya masih kurang baik karena disibukan oleh pekerjaan pribadinya sebagai pembisnis. Hal inilah yang kemudian menambah kerenggangan antara masyarakat dan desa, yang kemudian membuat interaksi Kepala Desa dengan masyarakat dan BPD semakin minim, sehingga pada akhirnya menyebabkan tidak ada kerjasama antara desa dan masyarakat. tetapi di lain sisi, Kemampuan Kepala Desa dalam kerjasama dengan pihak luar sudah cukup baik untuk mendukung pembangunan, ini dapat terlihat dari kerja sama antara desa dengan salah satu perguruan tinggi untuk renovasi dan penataan tribun di lapangan sepak bola desa, serta Kepala Desa juga berhasil meyakinkan

salah satu pabrik kecantikan dengan produknya bulu mata untuk membuka cabang di Desa Selaganggeng

B. Refleksi Teori

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sebuah gambaran mengenai pentingnya kapasitas kepemimpinan Kepala desa dalam menjalankan pembangunan infrastruktur desa, terutama bagi masyarakat Desa Selaganggeng supaya lebih kritis dan aktif sebagai kontrol dari pemerintahan desa serta menjadi sebuah gambaran bagaimana nantinya dapat lebih jeli dalam memilih Kepala Desa dan untuk Kepala Desa serta Perangkat desa semoga menjadi sebuah gambaran untuk lebih baik kedepannya, sehingga pembangunan infrastruktur Desa Selaganggeng bisa lebih berkembang. dan kemudian juga diharapkan penelitian ini dapat menjadi sebuah perbandingan atau gambaran bagi desa-desa lain untuk bagaimana Kapasitas Kepemimpinan Kepala Desanya dalam pembangunan infrastruktur. Selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk dunia ilmu pendidikan dan dapat digunakan sebagai sumber rujukan bagi peneliti untuk mengembangkan penelitian mengenai desa.

C. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka penulis dapat memberikan saran bahwa seharusnya Kepala Desa Selaganggeng harus bisa lebih transparansi, terutama mengenai anggaran desa, sehingga tidak menimbulkan asumsi-asumsi yang buruk dari masyarakat. Dan kemudian Kepala Desa harus lebih peka atau responsif terhadap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga program yang dihasilkan akan tepat sasaran. Selanjutnya Kepala Desa dalam penyusunan program desa harus melibatkan terutama masyarakat secara langsung, sehingga kemudian apa yang dibutuhkan masyarakat dapat diprioritaskan, sehingga kebijakan desa dapat mewakili kepentingan masyarakat
2. Sebagai seorang Kepala Desa, seharusnya harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakatnya ketimbang urusan pribadinya sendiri. Karena seorang Kepala Desa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya, maka Kepala Desa tersebut kurang bertanggung jawab atas apa yang diamanahkan pada dirinya sebagai pemimpin. Dan kemudian Kepala Desa seharusnya bisa

lebih berbau dengan masyarakat dan seluruh organisasi desa, sehingga akan terjadi interaksi yang baik dan tentunya hal tersebut juga akan memunculkan kerjasama antara masyarakat dan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, M Alfian. 2009. *Menjadi Pemimpin Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Alfian, M. Alfian. 2016. *Wawasan Kepemimpinan Politik :Perbincangan Kepemimpinan Di Ranah Kekuasaan*. PT Penjuru Ilmu Sejati: Bekasi
- Aqil & Munandar. 2020. “Kaderisasi PMII Cabang Kota Semarang dalam Meningkatkan Kapasitas Kepemimpinan Anggota”, dalam *UNNES Political Science Journal*
- Arikunto, Suharismi. 1995. *Dasar – Dasar Research*. Tarsoto:Bandung
- Arikunto, Suharismi. 2013. *Dasar – dasar Evaluasi Pendidikan*. Bumi Aksara: Jakarta
- Chuenpagdee & Jentoft. 2013. *Assessing governability What's next*. In *Governability of fisheries and aquaculture* (pp. 335-349). Springer, Dordrecht.
- Creswell, John W. 1998. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Tradition*. London: SAGE Publications.
- Femilia, Y. & Huda, N. 2020. “Kewenangan Desa Dalam Penataan Ruang Berdasarkan Undang-Undang Desa”, dalam *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No. 1
- Fitrianti & Romadhan & Salahudin. 2021. “Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan: Kajian Pustaka Terstruktur”, dalam *Journal of Regional and Rural Development Planing*
- Heryanto, Yanto. 2021. “Kepemimpinan Kepala Desa dalam Menjalankan Fungsi Administratif Pemerintahan Desa”, dalam *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 06, No. 09
- Jamaluddin & Sinaga. 2023. “Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021”, dalam *Jurnal Ajudan*, Vol.01, No. 02
- Kartono, Kartini. 2010. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.

- Kooiman & Bavinck & Chuenpagdee & Mahon & Pullin. 2008. "Interactive governance and governability an introduction", *The journal of transdisciplinary environmental studies*, 7(1), 1-11)
- Kooiman, J. 2009. "Exploring the concept of governability", *Journal of Comparative Policy Analysis. Research and Practice*, 10(2), 171-190.
- Kooiman, J. 2010. Governance and governability. In *The New Public Governance?* (pp 88-102) Routledge
- Kooiman, Jan. 2003. *Governing as Governance*. Sage Publications
- Kotalaha & Wawointana & Langkai. 2020. "Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pengambilan Keputusan di Desa Bakun Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat", dalam *Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 02, No. 02
- Lamangida, dkk. 2017. "Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Membangun Desa Bandung Rejo Kecamatan Boliyohuto", dalam *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 06, No. 01 Management.
- Mahmuda & Imelda. 2021. "Partisipasi Masyarakat dan Kapasitas Kepemimpinan Dalam Percepatan Covid-19 di DKI Jakarta", dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 06, No. 02
- Mamonto & Sumampouw & Undap. 2018. "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan", dalam *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Sam Ratulangi*, Vol. 01, No. 01
- Marayasa, I Nyoman. 2018. "Analisis Kepemimpinan Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor", dalam *Jurnal Ilmiah, Manajemen Sumber Daya Manusia*, Vol. 02, No. 01
- Matana & Lamandasa. 2021. "Kajian Pembangunan Infrastruktur Desa Sepe Kecamatan Lage", dalam *Jurnal Ilmiah Ekomen*, Vol.21, No. 02
- Moch, Solekhan. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara
- Moleong, Lexy. J. 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya,

- Ningrum, Artina Vita. 2015. “Kepemimpinan Politik Transformatif di Desa Ngangkatan Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk”. *Skripsi Thesis*. Universitas Airlangga
- Osburne, Stephen P. 2010. *The New Governance*. Routledge: London and New York
- Putri, Rizza Utami. 2022. “Governability Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Tanah Kasultanan”. *Skripsi*. Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”. Yogyakarta
- raharja.ac.id. 2020, 29 Oktober. Penelitian Kualitatif. Diakses pada 04 Oktober 2022, dari <https://raharja.ac.id/2020/10/29/penelitian-kualitatif/>
- Rivai & Mulyadi. 2009. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Safitri, Nur Aula. 2015. “Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik”, dalam *Ejournal UNESA*, Vol. 03, No. 01
- Selo & Elwan & Rizal. 2018. “Strategi Pengembangan Kapasitas Kepemimpinan Dalam Mewujudkan Peningkatan Kinerja Pengelola Jabatan Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara”, dalam *Journal PUBLICUHO*, Vol. 01, No. 03
- Shella. 2020. “Kapasitas Kepemimpinan Demokratis Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pegajahan Serdang Berdagi”. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU Medan
- Siburian, Kasman. 2021. “Kewenangan Kepala Desa Dalam Menjalankan Tugas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosiar)”, dalam *Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH)*, Vol. 02, No. 02
- sidesaselaganggeng.purbalinggakab.go.id. Diakses pada 1 Desember 2022, dari [Website Resmi Desa Selaganggeng \(purbalinggakab.go.id\)](http://Website Resmi Desa Selaganggeng (purbalinggakab.go.id))
- Soemantri, Bambang Trisantono. 2010. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Fokusmedia
- Sugiarto, dkk. 2020. “Investigasi Kapasitas Kepemimpinan Dalam Kelompok Peternak Sapi PO Kebumen di Pesisir Kabupaten Kebumen”, dalam *Journal UNS*

- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Bisnis. Penerbit Alfabeta; Bandung.
- Sugiyono. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Penerbit Alfabeta; Bandung
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Penerbit Alfabeta: Bandung
- Suryono, Agus. 2006. Teori dan Isu Pembangunan. Malang: Universitas Malang
- Susanti, Anik Yosi. 2017. “Sejarah dan Arsitektur Masjid Jami Piti Muhammad Cheng Ho di Desa Selagangeng (2005-2016)”. *Skripsi*. FKIP Universitas Muhamadiyah Purwokerto
- Sutoro, Eko. 2005. Memperkuat Kapasitas dan Kemandirian Desa. Yogyakarta: IRE
- Todaro. 2007. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jilid I, Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1.1

Draf Wawancara Kepala Desa Selaganggeng

Draft Wawancara Kepala Desa Selaganggeng

1. Bapak boleh bercerita sejak kapan bapak menjadi kepala Desa di Desa ini?
2. Bagaimana karakteristik desa ini, bisa diceritakan secara singkat mungkin pak?
3. Apakah bapak mengetahui karakteristik semua pegawai kantor desa?
4. Kan namanya pegawai karakternya berbeda-beda pak ya, bagaimana bapak menyikapinya?
5. Bagaimana upaya bapak untuk merangkul pegawai agar menjadi satu tujuan?
6. Bagaimana perkembangan pembangunan infrastruktur di desa ini, bisa diceritakan secara singkat pak?
7. Apa yang menjadi tolak ukur Bapak dalam menyusun program khususnya pembangunan infrastruktur desa?
8. Apakah masyarakat desa semua elemen dilibatkan dalam menyusun dan menjalankan program pembangunan infrastruktur pak?
9. Bagaimana sikap Bapak jika ada bawahan atau masyarakat mengkritik tentang kebijakan atau program pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan?
10. Bagaimana sikap Bapak jika ada bawahan atau masyarakat memberikan usulan atau aspirasi mengenai program pembangunan infrastruktur yang dirasa mungkin lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat?
11. Menurut Bapak apakah pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Selaganggeng saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat?
12. Bagaimana cara Bapak menerapkan prinsip transparansi dalam menjalankan pembangunan infrastruktur di Desa Selaganggeng?
13. Bagaimana cara Bapak untuk menerapkan prinsip responsif dalam menjalankan pembangunan infrastruktur di Desa Selaganggeng?
14. Bagaimana cara Bapak dalam menerapkan prinsip partisipatif dalam menjalankan pembangunan infrastruktur di Desa Selaganggeng?
15. Bagaimana upaya Bapak dalam menerapkan interaksi dengan perangkat desa, BPD dan masyarakat?
16. Bagaimana upaya Bapak dalam menerapkan kerjasama dengan pihak luar desa untuk menunjang pembangunan infrastruktur Desa Selaganggeng?

Lampiran 1.2

Draf Wawancara Perangkat Desa Selaganggeng

Draft Wawancara Aparatur Desa Selaganggeng

1. Bisa diceritakan Pak/Buk bagaimana kepemimpinan Bapak Kepala Desa selama ini?
2. Dalam segi pembangunan infrastruktur apakah program Bapak Kepala Desa dirasa sudah sesuai dengan kepentingan masyarakat?
3. Misalkan ada tugas bagaimana cara Kepala Desa melakukan komunikasi kepada Bapak/Ibu? Apakah tugas yang diberikan sudah sesuai dengan tugas dan fungsi Bapak/Ibu? Dan sesuai tidak dengan kemampuan Bapak/Ibu?
4. Dalam pengambilan keputusan mengenai pembangunan infrastruktur apakah Bapak/Ibu dilibatkan dalam pengambilan keputusan?
5. Apabila terdapat permasalahan, konflik ataupun kesalahpahaman antar pegawai mengenai tugas dan fungsinya, bagaimana cara Kepala Desa memecahkan permasalahan?
6. Apakah selama ini ada hadiah khususnya untuk pegawai yang rajin serta bagus kinerjanya dan apakah ada sanksi bagi pegawai yang tidak rajin serta kurang kinerjanya?
7. Bagaimana cara Kepala Desa mengkomunikasikan dengan Bapak/Ibu mengenai tugas, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur?
8. Bagaimana menurut Bapak/Ibu kemampuan Kepala Desa dalam menerapkan prinsip transparansi dalam menjalankan pembangunan infrastruktur di Desa Selaganggeng?
9. Bagaimana menurut Bapak/Ibu kemampuan Kepala Desa dalam menerapkan prinsip responsif dalam menjalankan pembangunan infrastruktur di Desa Selaganggeng?
10. Bagaimana menurut Bapak/Ibu kemampuan Kepala Desa dalam menerapkan prinsip partisipatif dalam menjalankan pembangunan infrastruktur di Desa Selaganggeng?
11. Bagaimana menurut Bapak/Ibu kemampuan Kepala Desa dalam melakukan interaksi dengan perangkat desa dalam menjalankan pembangunan infrastruktur di Desa Selaganggeng?
12. Bagaimana menurut Bapak/Ibu kemampuan Kepala Desa dalam melakukan kerjasama dengan pihak luar desa untuk menunjang pembangunan infrastruktur di Desa Selaganggeng

Lampiran 2.1

Draf Wawancara Masyarakat Desa Selaganggeng

Draft Wawancara Masyarakat Desa selaganggeng

1. Apakah Bapak/Ibu mengenal Kepala Desa?
2. Menurut Bapak/Ibu apakah Kepala Desa sering berbaur, berkumpul atau hanya sekedar mengobrol bareng dengan masyarakat?
3. Apakah masyarakat dilibatkan atau diikutsertakan dalam menyusun program pembangunan infrastruktur desa?
4. Ketika Bapak/Ibu memberikan saran, kritik atau masukan, apakah hal tersebut diterima baik oleh Kepala Desa?
5. Ketika ada program desa, terutama mengenai pembangunan infrastruktur, apakah Kepala Desa dan jajarannya mensosialisasikan program tersebut sehingga diketahui oleh seluruh masyarakat desa?
6. Bagaimana menurut Bapak/Ibu kemampuan Kepala Desa dalam menjalankan prinsip transparansi dalam menjalankan pembangunan infrastruktur di Desa Selaganggeng?
7. Bagaimana menurut Bapak/Ibu kemampuan Kepala Desa dalam menerapkan prinsip responsif dalam menjalankan pembangunan infrastruktur di Desa Selaganggeng?
8. Bagaimana menurut Bapak/Ibu kemampuan Kepala Desa dalam menerapkan prinsip partisipatif dalam menjalankan pembangunan infrastruktur di Desa Selaganggeng?
9. Menurut Bapak/Ibu interaksi yang dilakukan Kepala Desa dengan masyarakat apakah sudah baik?
10. Dalam pembangunan infrastruktur desa, Kepala Desa itu sering tidak melibatkan pihak luar desa atau sama sekali tidak pernah?

Lampiran 2.2
Foto Balai Desa Selaganggeng



Lampiran 3.1

Foto Bersama Sekretaris Desa Selagangeng



Lampiran 3.2

Foto Struktur Desa Selaganggeng



BIODATA



Nama : Dony Setiawan
Tempat, Tanggal Lahir : Batang Sangir, 21 Mei 1999
Alamat : Mekar Jaya RT 05 RW 03 Kecamatan Kayu Aro
Kabupaten Kerinci Jambi
Telpon/HP : 081271094194
Email : doni00850@gmail.com
Agama : Islam
Nama Orang Tua
 Ayah : Wagito
 Ibu : Nurhayati
Jumlah Saudara : 2
Anak Ke : 1
Riwayat Pendidikan : SDN 175 Lindung Jaya Kec. Kayu Aro Kerinci
Jambi (2006-2012)
SMPN 35 Kerinci Kec. Kayu Aro Barat Kerinci
Jambi (2012-2015)
MA RAUDLATUL ULUM Kec. Kayu Aro Kerinci
Jambi (2015-2018)
Fakultas FISIP UIN Walisongo (2019-sekarang)